

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku
							No. SK	Tanggal SK	
1	RAFIQ KAUTSAR	1872041912780004	JL. MANUNGGAL GG PALA V NO 07 RT/ RW 009/005 IRINGMULYO METRO TIMUR	1	15-02-2023	02-01-2027	S-122/KO.074/2023	15-02-2023	1
2	SUGIYANTO	1807062202860002	DUSUN ROWO TANGGAL RT/RW 012/004 BALEREJO KEC. BATANGHARI LAMPUNG TIMUR	2	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
3	MAHFUD	1807051409720002	DUSUN IV PASAR RT/012 RW/005 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	3	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
4	SUWITARJO	1807051112680001	DUSUN II RT/RW 004/002 HARGOMULYO KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	4	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
5	AGUS WIBOWO	3175071007680010	JL RAJAWALI NO 02 REJOMULYO RT/RW 024/006 METRO SELATAN	5	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
6	MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT	1807050603710002	HARGOMULYO RT/RW 009/002 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	6	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	Pendidikan Formal			Pendidikan Nonformal			Keanggotaan Komite			
	Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite
04-09-2024	3	04-10-2000	STMIK YPTK PADANG	SERTIFIKASI	28-08-2019	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
11-07-2026	2	11-04-2018	IAIM METRO	SERTIFIKASI	07-04-2016	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
27-04-2023	1	01-01-2000	STIT AGUS SALIM	SERTIFIKASI	27-04-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
14-05-2023	3	01-01-2000	STIT AGUS SALIM	SERTIFIKASI	14-05-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
27-04-2023	2	01-01-2000	UNIVERSITAS LAMPUNG	SERTIFIKASI	12-12-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
14-05-2023	2	01-01-2000	UNIVERSITAS LAMPUNG	SERTIFIKASI	12-12-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Unit Manajemen Risiko	Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)	Status Jabatan	Alasan Perubahan Jabatan	Keterangan Jabatan Anggota Direksi
1	2	2	0		Direktur Bisnis
2	1	2	0		Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan
0	2	2	0		
0	2	2	0		
0	2	2	0		
0	2	2	0		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

FORM 01.04
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
				Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU, PPT, dan / atau PPSPM	Fungsi Lainnya	
1	MIFTAHUL FAJAR	1807052908900004	DUSUN III RT/RW 009/005 SAMBIKARTO KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	0	0	2	0	0	31-10-2024
2	DIAN PUSPITASARI	1807056403890001	DUSUN IV PASAR RT/RW 012/005 SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	0	0	0	0	2	31-10-2024
3	RAHMAT ARDI PRASTYO	1802060610930001	DUSUN 3 RT/RW 006/002 TANGGUL ANGIN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH	0	0	0	0	2	27-03-2023
4	DIAH RETNO NINGSIH	1807055602880005	JL PEMIRI LR. MADRASAH RT/RW 004/001, KEL. 8 ILIR, KEC. ILIR TIMUR II PALEMBANG	2	2	0	2	0	27-03-2023
5	GESANG BAYU WININGSIH	1807056810850004	DUSUN VI RT/RW 021/009 SUMBERGEDE SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	0	0	0	0	2	03-04-2023

FORM 01.04
DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite				Status Pejabat Eksekutif
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	
006/SDI-SK/DIR/BAS/2024	31-10-2024	0	0	0	0	0
006/SDI-SK/DIR/BAS/2024	31-10-2024	0	0	0	0	0
004/SK-SDI/BAS/2023	27-03-2023	0	0	0	0	0
003/SK-SDI/BAS/2023	27-03-2023	0	0	0	0	0
006/SDI-SK/DIR/BAS/2023	03-04-2023	0	0	0	0	0

FORM 01.02
DATA KEPEMILIKAN BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Status Perubahan
MAHFUD	1807051409720002	DUSUN IV PASAR RT/012 RW/005 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	1	2.224.000.000	26,42	9
WINARSIH	1872034305690002	JL. SUMBAWA NO.44 RT/RW 049/010	1	2	2.907.000.000	34,53	9
YUM BADARIAH	1807055602730001	DUSUN IV PASAR RT/012 RW/005 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	516.000.000	6,13	9
SUGIYANTO	1807062202860002	DUSUN ROWO TANGGAL RT/RW 012/004 BALE REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR	1	2	632.000.000	7,51	9
WINARTO	1807051310790002	DUSUN II RT/RW 004/002 HARGOMULYO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	434.000.000	5,16	9
SUWITARJO	1807051112680001	DUSUN II RT/RW 004/002 HARGOMULYO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	365.000.000	4,34	9
MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT	1807050603710002	HARGOMULYO RT/RW 009/002 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	275.000.000	3,27	9

FORM 01.02
DATA KEPEMILIKAN BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Status Perubahan
DUL ROHIM	1807060707580009	DUSUN ROWO TANGGAL RT/RW 013/004 BALE REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR	1	2	207.000.000	2,46	9
RENA PRASESTI	1807054503910001	DUSUN V RT/RW 016/007 SUMBERGEDE SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	137.000.000	1,63	9
DIAN PUSPITASARI	1807056403890001	DUSUN IV RT/RW 012/005 SUMBERGEDE SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	374.000.000	4,44	9
AGUS WIBOWO	3175071007680010	JL RAJAWALI NO 02 REJOMULYO RT/RW 024/006 METRO SELATAN	1	2	135.000.000	1,60	9
RAFIQ KAUTSAR	1872041912780004	JL. MANUNGGAL GG PALA V NO 07 RT/ RW 009/005 IRINGMULYO METRO TIMUR	1	2	149.000.000	1,77	9
MIFTAHUL FAJAR	1807052908900004	DUSUN III RT/RW 009/005 SAMBIKARTO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	63.000.000	0,75	9
Jumlah					8.418.000.000	100,01	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

1. Nama BPR Syariah : BPRS AMAN SYARIAH
2. NPWP BPR Syariah : 664432077321000
3. Alamat Kantor : JL. RAYA SUMBERGEDE, KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
4. Kabupaten atau Kota : 3907
5. Sandi Wilayah OJK : 074
6. Provinsi : 3900
7. No. Telepon : 0725-5100000
8. Alamat *E-mail* : bprs_amansyariah@yahoo.co.id
9. Alamat *Website* : www.bankamansyariah.co.id
10. Nama Penanggung Jawab Penyusun Laporan : SITI NURAINI
11. Bagian Divisi Penanggung Jawab Penyusun Laporan : OPERASIONAL
12. No. Telepon Penanggung Jawab Penyusun Laporan : 085273613320
13. Alamat E-mail Penanggung Jawab Penyusun Laporan : sitinuraini3063@gmail.com
14. Diaudit oleh KAP : Ya
15. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit : KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan
16. Nama Akuntan Publik (AP) yang mengaudit : Einde Evana
17. Pemeriksaan ke ... dari KAP yang sama : 1
18. Nomor STTD AP : STTD.APS-09/PB.122/2020
19. Nomor STTD KAP : STTD.KAP-143/PM.22/2018
20. Tanggal RUPS : 28-01-2023
 - a. Dividen yang Dibayar : 825.014.420
 - b. Bonus Tahunan dan Tantiem : 0
21. Nilai Nominal per Lembar Saham : 1.000.000
22. Status Penawaran Umum Efek : Tidak
23. Pedagang Valuta Asing (PVA)
 - a. Memiliki Izin PVA : 2
 - b. Tanggal Izin PVA :
 - c. Jumlah Kantor PVA :
24. Memiliki/Tidak Memiliki Layanan Perbankan Elektronik (E-Banking) : 2
25. Penyelenggara Teknologi Informasi
 - a. Status Penyelenggara : 2
 - b. NPWP Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI) : 00001
 - c. Nama Pihak PJTI : PT. MITRASOFT GLOBAL PERDANA
26. Penyelenggara Laku Pandai : 2

FORM 01.01
INFORMASI POKOK BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

- 27. Jumlah Agen Laku Pandai :
- 28. Informasi Perubahan Kepemilikan
 - a. Nomor Akta RUPS : 24
 - b. Tanggal RUPS : 28-10-2024
- 29. Nama Ultimate Shareholder 1 :
- Nama Ultimate Shareholder 2 :
- Nama Ultimate Shareholder 3 :
- Nama Ultimate Shareholder 4 :
- Nama Ultimate Shareholder 5 :
- Nama Ultimate Shareholder 6 :
- Nama Ultimate Shareholder 7 :
- Nama Ultimate Shareholder 8 :
- Nama Ultimate Shareholder 9 :
- Nama Ultimate Shareholder 10 :

Form A.03.01
Riwayat Pendirian BPR Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	: 15
Tanggal akta pendirian	: 11-02-2014
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	: 23
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	: 30-10-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	: 13-02-2014
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	: 02-01-2015
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah dan deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah serta bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah. Memberikan pembiayaan/penyaluran dana berdasarkan prinsip jual beli murabahah, istishna, salam dan jual beli lainnya. memberikan pembiayaan/penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, musyarokah dan bagi hasil lainnya. memberikan pembiayaan/penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah, piutang multijasa, hiwalah dan lainnya. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya, menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan prinsip syariah.
Tempat kedudukan	: Jalan Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

Riwayat Pendirian PT BPRS Aman Syariah

FORM 03.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
- GABUNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
A.	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	10000	5.426.523.190
	1. Surat Berharga Syariah	10200	0
	2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	11000	99.610.285
	a. Bonus Wadiah	11100	16.701.113
	i. Giro	11110	16.701.113
	ii. Tabungan	11120	0
	b. Bagi Hasil	11200	82.909.172
	i. Giro	11210	0
	ii. Tabungan	11220	0
	iii. Deposito	11230	82.909.172
	c. Lainnya	11300	0
	3. Pembiayaan yang diberikan	12000	5.326.912.905
	a. Kepada bank lain	12100	0
	i. Pendapatan Piutang	12110	0
	a) Murabahah	12111	0
	b) Istishna	12112	0
	c) Multijasa	12113	0
	d) Ujrah	12114	0
	i. Gadai	12115	0
	ii. Lainnya	12116	0
	e) Lainnya	12117	0
	ii. Pendapatan Bagi Hasil	12120	0
	a) Mudarabah	12121	0
	b) Musyarakah	12122	0
	c) Lainnya	12123	0
	iii. Pendapatan Sewa	12130	0
	a) Pendapatan Ijarah	12131	0
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	0
	b. Kepada pihak ketiga bukan bank	12200	5.326.912.905
	i. Pendapatan Dari Piutang	12210	4.772.853.152
	a) Murabahah	12211	1.516.339.908
	b) Istishna	12212	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	c) Multijasa	12213	3.256.513.244
	d) Ujrah	12214	0
	i. Gadai	12215	0
	ii. Lainnya	12216	0
	e) Lainnya	12217	0
	ii. Pendapatan Bagi Hasil	12220	554.059.753
	a. Mudarabah	12221	0
	b. Musyarakah	12222	554.059.753
	c. Lainnya	12223	0
	iii. Pendapatan Sewa	12230	0
	a. Pendapatan Ijarah	12231	0
	b. Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232	0
	iv. Pendapatan Salam	12240	0
	4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi hasil/Sewa -/-	14000	0
B.	Bagi Hasil untuk Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah dan Dana Syirkah Temporer -/-	15000	2.450.059.464
	1. Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah	15100	2.450.059.464
	a. Kepada Bank Lain	15110	1.707.386.663
	i. Tabungan	15111	0
	ii. Deposito	15112	1.707.386.663
	iii. Pembiayaan diterima	15113	0
	iv. Lainnya	15114	0
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	742.672.801
	i. Tabungan	15121	176.642.109
	ii. Deposito	15122	566.030.692
	iii. Pembiayaan diterima	15123	0
	iv. Lainnya	15124	0
	2. Dana Syirkah Temporer	15200	0
	a. Kepada Bank Lain	15210	0
	i. Pembiayaan diterima	15213	0
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	0
	i. Pembiayaan diterima	15223	0
C.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I - II)	19000	2.976.463.726
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	369.643.327

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	1. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Investasi Terikat	21000	0
	2. Pendapatan Dari Penyertaan, Fee/Komisi/Provisi	22000	6.014.000
	a. Pendapatan fee wakalah	22100	0
	b. Pendapatan fee kafalah	22200	0
	c. Pendapatan jasa lainnya	22300	6.014.000
	d. Dividen	22400	0
	e. Keuntungan dari Penyertaan dengan Equity Method	22500	0
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	0
	4. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	28000	0
	5. Pemulihan CKPN	24000	262.561.431
	6. Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	0
	7. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	0
	8. Lainnya	27000	101.067.896
E.	Beban Operasional	30000	5.871.810.122
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	0
	2. Beban Imbalan Atas Pembiayaan Yang Diterima	30110	0
	3. Bonus Titipan Wadiah	30200	34.702.159
	a. Bank Lain	30210	0
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	34.702.159
	4. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	75.351.413
	a. Pembiayaan	30310	0
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	75.351.413
	c. Lainnya	30390	0
	5. Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	30400	1.943.032.960
	a. Penempatan Pada Bank Lain	30410	5.045.199
	b. Piutang	30420	1.935.487.761
	i. Piutang Murabahah	30421	194.472.298
	ii. Piutang Istishna	30422	0
	iii. Piutang Multijasa	30423	1.741.015.463
	iv. Piutang Sewa	30424	0
	v. Piutang Qardh	30425	0
	c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	2.500.000
	i. Mudarabah	30431	0
	ii. Musyarakah	30432	2.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	iii. Lainnya	30433	0
	d. Surat Berharga Syariah	30440	0
	e. Penyertaan Modal	30450	0
	f. Lainnya	30490	0
	6. Kerugian Penurunan Nilai Aset lainnya	30500	0
	a. Aset Ijarah	30510	0
	b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	0
	c. Aset Tidak Berwujud	30530	0
	d. Agunan yang diambil Alih	30540	0
	e. Persediaan	30550	0
	7. Penyusutan/amortisasi	30600	88.890.853
	a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	79.887.733
	b. Aset Tidak Berwujud	30620	9.003.120
	c. Lainnya	30690	0
	8. Perbaikan Aset Ijarah	30700	0
	9. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	0
	10. Kerugian Pelepasan Aset Yang Diambil Alih	30900	0
	11. Tenaga Kerja	31000	2.838.812.746
	a. Dewan Komisaris & Pengawas	31010	411.240.094
	b. Direksi	31020	587.903.713
	c. Pegawai	31030	1.559.744.005
	d. Lainnya	31040	279.924.934
	12. Pendidikan dan Pelatihan	31100	92.875.149
	a. Dewan Komisaris & DPS	31110	24.348.949
	b. Direksi	31120	2.800.000
	c. Karyawan	31130	65.726.200
	d. Lainnya	31140	0
	13. Penelitian dan Pengembangan	31200	0
	14. Sewa	31300	241.201.882
	15. Pemasaran	31400	33.777.950
	a. Iklan	31410	0
	b. Lainnya	31420	33.777.950
	16. Barang dan Jasa	31500	270.402.867
	a. Beban penyelenggaraan teknologi informasi	31510	59.614.854

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	b. Lainnya	31520	210.788.013
	17. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	0
	18. Kerugian terkait Risiko Operasional	31700	0
	a. Kecurangan Internal	31710	0
	b. Kejahatan Eksternal	31720	0
	19. Kerugian dari Penjualan Surat Berharga	31810	0
	20. Kerugian dari Penyertaan Modal dengan Equity Method	31820	0
	21. Lainnya	31900	252.762.143
F.	1. Laba Operasional	40000	0
	2. Rugi Operasional	40100	2.525.703.069
G.	Pendapatan Non Operasional	41000	13.418.000
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	0
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	0
	3. Lainnya	41900	13.418.000
H.	Beban Non Operasional	42000	13.516.000
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	0
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	0
	3. Lainnya	42900	13.516.000
I.	1. Laba Non Operasional	43000	0
	2. Rugi Non Operasional	43100	98.000
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	0
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	2.525.801.069
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	0
L.	Pajak Tangguhan	46000	0
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	0
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	0
M.	Zakat	47000	0
N.	Laba/Rugi Bersih	48000	(2.525.801.069)
	1. Laba Bersih	48100	0
	2. Rugi Bersih	48200	2.525.801.069
O.	Penghasilan Komprehensif Lain		
	1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	51100	0
	b. Lainnya	51200	0

FORM 03.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
- GABUNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	c. Pajak Penghasilan terkait -/-	51300	0
	2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	52100	0
	b. Lainnya	52200	0
	c. Pajak Penghasilan terkait -/-	52300	0
P.	Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	60000	0
Q.	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	70000	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Jenis Rasio	Sandi	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	0101	31,72
2	Rasio Cadangan terhadap PPKA	0202	100,00
3	Non Performing Financing (NPF) Neto	0203	14,16
4	Non Performing Financing (NPF) Gross	0204	9,21
5	Return on Asset (ROA)	0401	(5,57)
6	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	0402	143,58
7	Net Imbalan (NI)	0403	6,94
8	Financing to Deposit Ratio (FDR)	0501	171,59
9	Cash Ratio	0502	18,07

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Penyebab Utama Nasabah nasabah Bermasalah penyumbang NPF dikarenakan beberapa hal yakni: Nasabah mengalami penurunan pendapatan sebagai akibat penurunan omzet karena kalah dalam persaingan usaha sehingga mengakibatkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran menurun. Adanya pendapatan nasabah yang masih menjadi piutang sehingga mengganggu cashflow usaha nasabah yang berakibat nasabah berat untuk memenuhi kewajibannya. Adanya nasabah yang terindikasi terjerat kasus hukum sehingga nasabah tidak bisa menjalankan usahanya atau tidak bisa memperoleh penghasilan. Adanya persoalan rumah tangga sehingga hal tersebut mengganggu perekonomian nasabah karena pendapatan yang ada di alokasikan terlebih dahulu dalam penyelesaian persoalannya tersebut. Adanya nasabah yang memang menyampaikan bahwa belum akan membayarkan kewajibannya sebagai bentuk kekecewaan terhadap bank karena menurut nasabah Bank belum menyelesaikan proses peningkatan atau pengurusan atas jaminan nasabah. Adanya nasabah yang berganti profesi atau usaha dikarenakan usaha sebelumnya bangkrut, sementara profesi atau usaha yang baru belum mendapat hasil yang cukup untuk memenuhi kewajiban angsuran. Adanya peningkatan biaya hidup dari keluarga nasabah seperti biaya pendidikan anak, sementara penghasilan yang ada menurun sehingga penghasilan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kewajiban angsuran.
Penyebab Utama	Dalam hal penyelesaian nasabah-nasabah bermasalah penyumbang NPF Bank telah melakukan: Melakukan tagihan secara intensif dengan melakukan kunjungan berkala ke lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah untuk meminta nasabah segera menunaikan kewajiban angsurannya. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan usaha namun masih kooperatif dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran. Melakukan koordinasi dan follow up intensif ke pihak notaris dalam rangka percepatan dalam penyelesaian peningkatan atau pengurusan jaminan nasabah. Melakukan Litigasi jaminan nasabah yang sudah tidak kooperatif dan dengan melakukan permohonan sita eksekusi dan lelang jaminan ke pengadilan Agama dan KPKNL.

Penyebab Utama dan Langkah Penyelesaian Nasabah NPF PT BPRS Aman Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Form A.03.05**Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Penyaluran pembiayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha BPRS namun saat ini terkendala dengan banyaknya jumlah nasabah bermasalah yang cukup signifikan. Oleh karena itu perkembangan usaha BPRS mengalami penurunan dan kendala.

Selain itu, dari sisi pendanaan pada Tahun 2024 mengalami perkembangan/peningkatan. Hal ini ditopang oleh produk pendanaan diantaranya berupa Tabungan Idul Fitri, Tabungan Wadiah, Tabungan Ta'awun, Tabungan Ukhuwah.

Namun terhadap Tabungan idul fitri memiliki dampak terhadap kecukupan liquiditas pada saat menjelang hari raya Idul Fitri sehingga Dewan Direksi mengambil kebijakan pembatasan atau pemberhentian Tabungan Idul Fitri sehingga pendanaan di awal tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Form A.04.00

Strategi dan Kebijakan Manajemen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Dalam Upaya pengembangan bisnis usaha BPR Syariah, strategi dan kebijakan manajemen yang ditetapkan oleh manajemen dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Bisnis Pada Era Digital

Pada era digitalisasi seperti saat ini, BPR Syariah Aman Syariah harus mampu bersaing dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat. Namun dengan masih adanya keterbatasan BPR Syariah dalam pengembangan bisnis yang berorientasi pada teknologi, BPR Syariah Aman Syariah tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan nasabah dengan melakukan pengembangan core banking system untuk dapat melakukan pick up tabungan langsung dilokasi nasabah secara online dan offline dan Pengembangan Virtual Account yang sudah terintegrasi dengan Core Banking. Adanya pengembangan pelayanan kepada nasabah tersebut diharapkan mampu meningkatkan portofolio pendanaan dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi

Strategi yang dilakukan dalam upaya pengembangan teknologi informasi BPR Syariah Aman Syariah yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pengkinian informasi data nasabah.
- Percepatan proses informasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan BPR Syariah Aman Syariah dalam merealisasikan rencana bidang Teknologi Informasi sebagai berikut:

- Melakukan pengkinian informasi data nasabah;
- Percepatan proses informasi; dan
- Akurat, *Credible Information Technology*.

3. Penguatan Permodalan

Pada tahun 2024 rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BPR Syariah Aman Syariah adalah sebesar 31,72% atau berada pada peringkat 1 (sangat memadai). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BPR Syariah masih memiliki kecukupan permodalan yang sangat memadai terhadap kondisi risiko yang dihadapi. Dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha BPR

Syariah, BPR Syariah Aman Syariah mampu mengantisipasi seluruh risiko dan mendukung ekspansi usaha serta dapat menyerap seluruh kerugian. Hal lain yaitu BPR Syariah memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan memiliki dukungan dari pemegang saham.

4. Strategi Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, maka BPR Syariah Aman Syariah akan meningkatkan fungsi bagian manajemen risiko dan tata kelola dengan optimal serta melakukan pengkinian/review terkait ketentuan kebijakan, system dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti hal tersebut, sehingga langkah atau upaya yang dilakukan BPR Syariah Aman Syariah dalam penerapan manajemen risiko dan tata Kelola yaitu sebagai berikut:

- Dengan mengoptimalkan pelaksanaan tata Kelola yang baik *good corporate governance* (GCG) pada BPRS sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*).
- Mengoptimalkan peran Manajemen Risiko dan kepatuhan dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM melalui sosialisasi Apu PPT dan PPPSPM.
- Berperan aktif dalam menumbuhkan *awareness* (kesadaran) anti fraud disetiap level organisasi melalui sosialisasi anti fraud.
- Meningkatkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dengan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, ketentuan dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank terhadap ketentuan Bi dan/atau OJK serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- Meningkatkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dalam penerapan kepatuhan BPRS dengan melakukan monitoring kepatuhan baik terhadap eksternal, internal maupun prinsip syariah.
- Melaksanakan system pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPRS melalui penyusunan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur.

5. Strategi Pemasaran

Pemasaran merupakan upaya atau langkah yang paling efektif dalam memperkenalkan BPR Syariah ke masyarakat luas, dengan pemasaran BPR Syariah dapat dikenal oleh semua lapisan masyarakat sehingga diharapkan pengguna jasa BPR Syariah oleh masyarakat mengalami pertumbuhan.

Pemasaran yang dilakukan oleh BPR Syariah Aman Syariah adalah sebagai berikut:

- Membuat dan membagikan brosur dipasar-pasar tradisional dan ditempat-tempat yang strategis.
- Membuat dan membagikan kartu nama petugas pendanaan maupun pembiayaan kepada nasabah atau relasi yang dimiliki.
- Membuat spanduk dan memasang ditempat strategis agar produk layanan Bank dapat diketahui oleh masyarakat.
- Membuat kalender untuk nasabah-nasabah aktif dan dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, masjid, puskesmas, dan lain-lain.
- Membuat iklan atau promosi melalui beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Website, dan lainnya.

6. Arah Kebijakan Dalam Penguatan Usaha BPR Syariah

BPR Syariah Aman Syariah menetapkan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan dan pengembangan BPR Syariah yang lebih kuat dan sehat, maka BPR Syariah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas SDM;
- Pengembangan teknologi guna mendukung kegiatan Operasional;
- Meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*;
- Melakukan efisiensi biaya;
- Peningkatan performa bisnis; dan
- Memberikan apresiasi kepada pengurus dan karyawan.

7. Strategi Pengelolaan Produk dan Usaha

a. Diversifikasi Produk

- Mengembangkan variasi produk pembiayaan syariah: seperti pembiayaan murabahah (jual beli), ijarah (sewa), musyarakah dan mudharabah (kemitraan).
- Menyediakan produk tabungan dan deposito berbasis akad wadiah dan mudharabah.
- Menyasar segmen mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan konsumen berbasis kebutuhan rumah tangga syariah.

b. Pemetaan Pasar dan Penetrasi

- Melakukan segmentasi nasabah berdasarkan demografi (usia, profesi, lokasi) dan psikografi (gaya hidup Islami, kebutuhan keuangan).
- Fokus pada area geografis dengan basis komunitas Muslim yang kuat.
- Memperkuat jaringan pelayanan melalui cabang/kas atau Mitra BPRS Aman Syariah.

c. Penguatan SDM dan Budaya Kerja Syariah

- Pelatihan rutin karyawan tentang keuangan syariah, customer service, serta produk dan layanan baru.
- Menanamkan budaya kerja berbasis nilai-nilai syariah: amanah, profesional, dan pelayanan prima.

8. Kebijakan Manajemen Pengelolaan Produk dan Usaha

a. Kebijakan Produk

- Semua produk wajib melewati telaah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum diluncurkan.
- Setiap pengembangan produk baru harus didahului oleh studi kelayakan pasar dan analisis kebutuhan nasabah.
- Produk harus memenuhi prinsip syariah: bebas dari riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi).

b. Kebijakan Manajemen Risiko

- Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam setiap aktivitas pembiayaan.
- Penilaian risiko kredit dilakukan secara ketat berbasis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dan prinsip syariah.
- Menyusun kerangka mitigasi risiko untuk produk baru sebelum diluncurkan.

c. Kebijakan Pembiayaan

- Prioritas pada pembiayaan produktif UMKM dan sektor riil berbasis syariah.
- Membatasi exposure ke sektor spekulatif dan usaha-usaha yang berpotensi syubhat (tidak jelas kehalalannya).
- Diversifikasi portofolio pembiayaan untuk mencegah konsentrasi risiko.

d. Kebijakan Pengembangan Usaha

- Merencanakan ekspansi cabang secara bertahap sesuai dengan hasil analisa potensi pasar.
- Membentuk unit bisnis khusus untuk menangani bisnis digital.
- Bekerjasama dengan lembaga keuangan, sekolah, pesantren, dan komunitas syariah untuk memperluas jaringan nasabah.

9. Kajian Profil Risiko BPRS Aman Syariah

a. Risiko Pembiayaan (Credit Risk)

Risiko terbesar berasal dari kemungkinan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam segmen UMKM dan mikro. BPRS Aman Syariah mengantisipasi ini dengan memperketat analisis kelayakan nasabah, melakukan

pendampingan usaha, serta memperluas agunan alternatif seperti skema kafalah (jaminan pihak ketiga).

b. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Karena skala usaha relatif kecil, BPRS rentan terhadap risiko ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditas secara mendadak. Untuk mengelola ini, manajemen menerapkan kebijakan buffer dana minimum dalam kas dan giro pada bank umum syariah, serta melakukan proyeksi cash flow bulanan secara ketat.

c. Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko ini timbul dari kesalahan prosedur internal, kelemahan sistem teknologi, atau fraud karyawan. BPRS Aman Syariah mengurangi risiko ini dengan memperkuat SOP operasional, menerapkan sistem kontrol internal berlapis, serta mengadakan audit internal triwulanan.

d. Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk)

Risiko pelanggaran prinsip syariah sangat kritis. BPRS Aman Syariah menjaga kepatuhan syariah melalui verifikasi produk oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum peluncuran dan mengadakan review rutin atas operasional bisnis.

e. Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Sebagai lembaga berbasis kepercayaan, BPRS Aman Syariah harus menjaga nama baik di tengah masyarakat. Untuk itu, dilakukan komunikasi terbuka kepada nasabah, penanganan keluhan secara cepat, dan penyebaran informasi positif melalui berbagai media.

f. Risiko Strategis (Strategic Risk)

Risiko kegagalan dalam perencanaan bisnis atau adaptasi pasar. BPRS Aman Syariah memitigasi risiko ini dengan melakukan kajian strategi minimal setahun sekali, memperhatikan perubahan regulasi OJK, BI, dan DSN-MUI, serta mengadopsi tren digitalisasi keuangan.

10. Visi Pengembangan

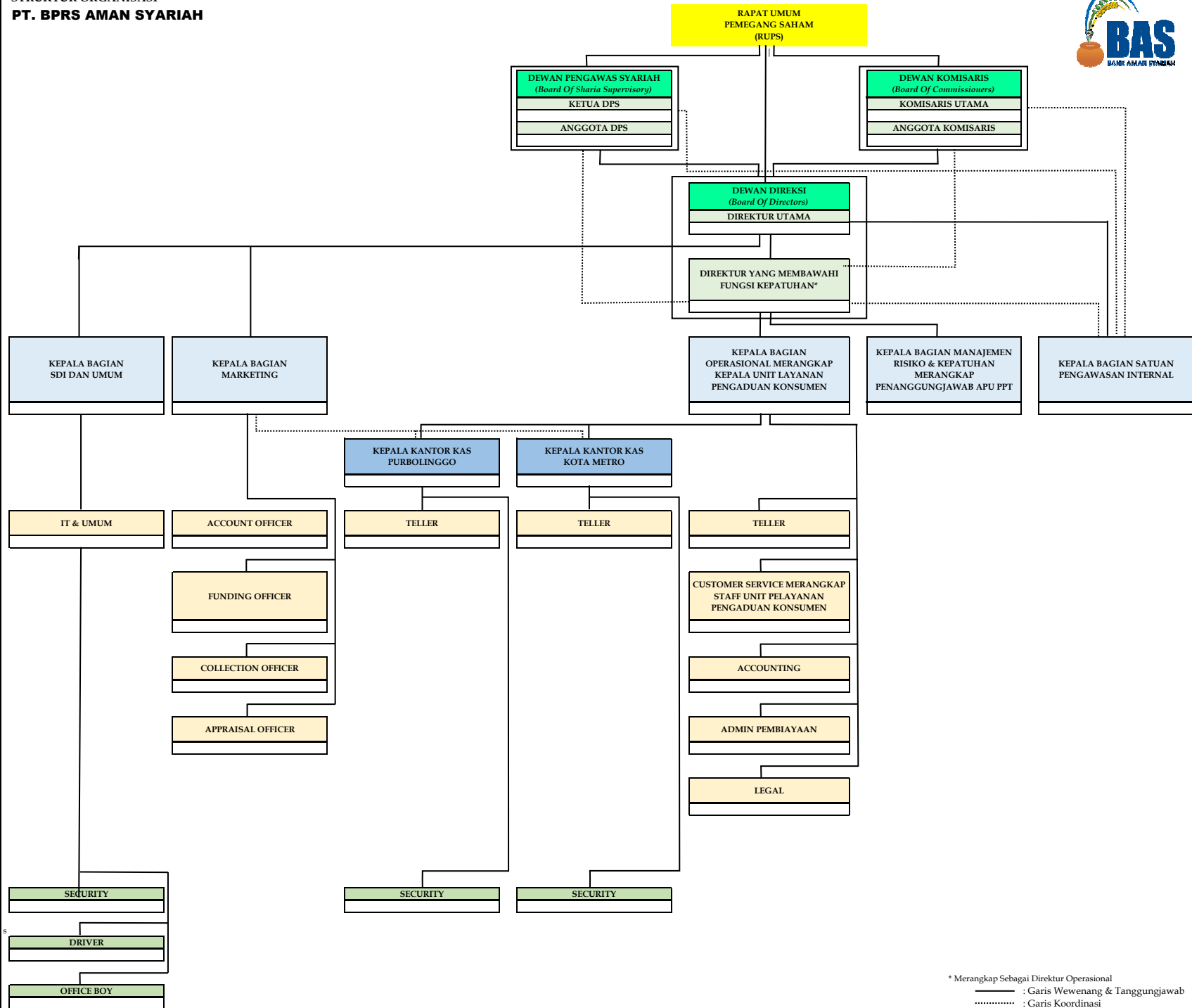
BPRS Aman Syariah menargetkan untuk menjadi BPRS terbaik dalam pelayanan berbasis syariah di Propinsi Lampung dengan:

a. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kepatuhan syariah.

b. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan.

c. Mengelola risiko secara terukur dan terstruktur agar menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang.

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPRS AMAN SYARIAH



* Merangkap Sebagai Direktur Operasional
 — : Garis Wewenang & Tanggungjawab
 -.- : Garis Koordinasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	TABUNGAN KHUSUS WADIAH (TAKWA)	Tabungan yang penarikan tabungannya dapat dilakukan setiap saat pada jam operasional Bank.
01	01	TABUNGAN WISATA (TAWA)	Tabungan yang diperuntukan untuk kegiatan wisata atau menghadiri kegiatan/acara tertentu yang penarikannya dapat dilakukan pada jam operasional Bank jika saldo tabungan sudah pada nominal tertentu.
01	01	TABUNGAN KELUARGA SAMARA (TAKASMARA)	Tabungan yang diperuntukan untuk para calon pasangan yang merencanakan akan membina rumah tangga.
01	01	TABUNGAN ANAK SEJAHTERA (TABANAS)	Tabungan yang diperuntukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar gemar menabung.
01	01	TABUNGAN QURBAN AMAN SYARIAH (TAQURBANAS)	Tabungan yang diperuntukan untuk persiapan qurban di Hari Raya Idul Adha.
01	01	TABUNGAN MASA TUA (TAMATU)	Tabungan yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabah pensiunan dan calon pensiunan dalam melakukan transaksi perbankan.
01	01	TABUNGAN PENDIDIKAN AMAN SYARIAH (TAPENAS)	Tabungan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
01	01	TABUNGAN HAJI MABRUR (TAJIMABRUR)	Tabungan yang dirancang khusus nasabah yang merencanakan untuk berangkat ibadah Haji.
01	01	TABUNGAN MAKBULOH UMROH (TAMU)	Tabungan yang dirancang khusus nasabah yang merencanakan untuk berangkat ibadah Umroh. Nasabah dapat menentukan sendiri rencana dana kebutuhan umroh.
01	01	TABUNGAN IDUL FITRI (TIFI)	Tabungan yang diperuntukan dan penarikannya dapat dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
01	01	TABUNGAN TA'AWUN	Tabungan Bank Aman Syariah yang dikemas dalam bentuk arisan dengan pengelolaan dan penghimpunan dana sesuai dengan Syariah Islam.
01	01	TABUNGAN UKHUWAH	Tabungan Ukhawah atau tabungan bersama BPR Syariah Se Indonesia merupakan produk tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dengan tambahan assesoris yaitu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang telah ditentukan mekanismenya dengan diundi. Assesoris hadiah-hadiah tersebut merupakan wujud penghargaan yang ditujukan untuk nasabah penabung yang telah mempercayakan menyimpan dananya di BPR Syariah.
01	01	DEPOSITO UMUM	Investasi berjangka dalam mata uang rupiah dengan bagi hasil menarik dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	DEPOSITO ANTAR BANK	Penempatan dana antar Bank dalam mata uang rupiah dengan bagi hasil menarik.
02	01	PEMBIAYAAN MURABAHAH	Akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu
02	01	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Musyarakah juga berarti "akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan" Kerjasama di atas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/ pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dan/atau pihak lain (di luar anggota perkongsian dan disepakati bersama)
02	01	PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA	Jenis akad untuk mengambil manfaat (Ajrán) dengan jalan penggantian. Meskipun manfaat adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dari selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa
02	01	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola, dalam hal ini harus dilakukan investigasi terhadap sebab-sebab kerugian. Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

PT BPRS AMAN SYARIAH MEMILIKI KATEGORI KEGIATAN USAHA BERUPA PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

Form A.05.03

Teknologi Informasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Dalam mendukung kegiatan Operasional. PT BPRS Aman Syariah bekerjasama dengan PT. Mitrasoft Global Perdana. Core Banking yang digunakan dalam mendukung pengembangan produk dan layanan BPRS Aman Syariah adalah *Islamic Banking Application (IBA)* dan sudah digunakan dari tahun 2017 sampai dengan saat ini.

Untuk Data Center terletak di PT DCI Indonesia Cibitung dengan Alamat Jl. Halmahera No.1 Blok F1, Danau Indah, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kode Pos : 17530.

Untuk Digitalisasi saat ini BPRS Aman Syairah memakai Aplikasi *Mobile Collector* yaitu aplikasi berbasis Android untuk membantu tim Funding melakukan Pick Up Tabungan langsung kepada nasabah.

FORM 09.00
DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Non Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
Liabilitas Kepada Bank Lain	17.601.002.444	181.794.831	50,00	105756694,00	6,53
Tabungan Mudarabah	3.387.262.388	36.873.450	25,00	1072003,00	3,00
Deposito Mudarabah	8.506.172.000	92.597.491	10,00	50218204,00	10,00
a. 1 (satu) bulan	0	0	0,00	0,00	0,00
b. 3 (tiga) bulan	1.639.500.000	17.847.463	40,00	7138985,00	5,23
c. 6 (enam) bulan	1.602.000.000	17.439.240	50,00	8719621,00	6,53
d. 12 (dua belas) bulan	5.264.672.000	57.310.788	50,00	34359598,00	6,53
Pembiayaan Diterima	0	0	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	29.494.436.832	311.265.772		157046901,00	

FORM 09.00 DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
Penempatan pada Bank Lain	0,00	0,00
Piutang Murabahah	10162241163,00	150317214,00
Piutang Istishna	0,00	0,00
Piutang Multijasa	4812860755,00	227828298,00
Pembiayaan Gadai	0,00	0,00
Pembiayaan Mudarabah	0,00	0,00
Pembiayaan Musyarakah	1750000000,00	25001500,00
Pembiayaan Sewa	0,00	0,00
Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	16725101918,00	403147012,00

FORM 09.00 DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasikan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	10,00	0,00	10,00
Tabungan Mudarabah	0	0	10,00	0,00	10,00
Deposito Mudarabah	0	0	10,00	0,00	10,00
a. 1 (satu) bulan	0	0	10,00	0,00	10,00
b. 3 (tiga) bulan	0	0	10,00	0,00	10,00
c. 6 (enam) bulan	0	0	10,00	0,00	10,00
d. 12 (dua belas) bulan	0	0	10,00	0,00	10,00
Pembiayaan Diterima	0	0	10,00	0,00	10,00
JUMLAH	0	0		0,00	

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
Penempatan pada Bank Lain	0	0
Piutang Murabahah	0	0

FORM 09.00
DAFTAR RINCIAN LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
Piutang Istishna	0	0
Piutang Multijasa	0	0
Pembiayaan Gadai	0	0
Pembiayaan Mudarabah	0	0
Pembiayaan Musyarakah	0	0
Pembiayaan Sewa	0	0
Pembiayaan Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Form A.05.05**Perkembangan dan Target Pasar**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Pengembangan usaha BPRS pada Tahun 2024 belum mengalami pengembangan. Hal itu dikarenakan belum optimalnya kontribusi dari 2 kantor kas yang sudah ada dan rencana peningkatan kantor kas menjadi cabang belum terwujud sehingga target pengembangan usaha dan target pasar tidak tercapai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

- Nama Kantor BPR Syariah : BPRS AMAN SYARIAH
- Sandi Kantor BPR Syariah : 001
- Alamat Kantor BPR Syariah
 - Nama Jalan dan No. : JL. RAYA SUMBERGEDE
 - Desa/Kelurahan dan Kecamatan : SUMBERGEDE
 - Kab./Kota : 3907
 - Kode Pos : 34352
- Lokasi Koordinat Kantor
 - Latitude : -5.134521
 - Longitude : 105.428596
- Status Kepemilikan Gedung : 1
- Nama Pimpinan Kantor : RAFIQ KAUTSAR
- No. Telp : 7255100000
- Jumlah Karyawan : 37

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
S3	0	0
S2	1	0
S1/D4	9	14
D3	1	1
SLTA	3	8
Lainnya	0	0

b. Berdasarkan Bagian

Bagian	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
Pemasaran	1	5
Pelayanan	1	5
Lainnya	12	13
Total	14	23

- Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 22
 - Perempuan : 15
- Usia

Form 01.00
DATA KANTOR BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

a. <=25	:	3
b. >25 - 35	:	28
c. >35 - 45	:	5
d. >45 - 55	:	1
e. >55	:	0
11. Jumlah Sentra Keuangan Khusus	:	0
12. Jumlah Kantor Kas	:	2
13. Jumlah Kas Keliling	:	0
14. Jumlah EDC	:	
a. Milik Sendiri	:	0
b. Milik Bank Umum	:	0
c. Milik BPR Syariah/BPR Lain	:	0
15. ATM	:	
a. Jumlah Dikelola Sendiri	:	0
b. Jumlah ATM Kerjasama dengan Pihak Lain	:	0
c. Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
d. Nama Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	nihil
16. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	:	
a. Status Data	:	0
b. Persetujuan OJK	:	
1) Nomor	:	
2) Tanggal	:	
c. Alamat Sebelumnya	:	
d. Tanggal Pelaksanaan	:	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

1. Jenis : 01
2. Sandi Kantor Induk : 001
3. Status Data : 0
4. Tanggal Pelaksanaan :
5. Sandi Kantor Sebelumnya :
6. Nama Kantor : BPRS AMAN SYARIAH KANTOR KAS PURBOLINGGO
7. Kode Kantor : 102
8. Alamat : JL. BUNGUR RAYA, TANJUNG INTEN, KEC. PURBOLINGGO
LAMPUNG TIMUR
9. Kabupaten/Kota : 3907
10. Lokasi Koordinat
 - a. Latitude : -4.9678685
 - b. Longitude : 105.502229
11. Nama Pimpinan Kantor : MISBAKHUL MUNIR
12. No. Telepon Kantor : 0
13. Sandi Kantor Kendali :
14. Tanggal Persetujuan :
1. Jenis : 01
2. Sandi Kantor Induk : 001
3. Status Data : 0
4. Tanggal Pelaksanaan :
5. Sandi Kantor Sebelumnya :
6. Nama Kantor : BPRS AMAN SYARIAH KANTOR KAS METRO
7. Kode Kantor : 103
8. Alamat : PERTOKOAN PASAR MODERS KOPINDO BLOK R-08 KOTA
METRO
9. Kabupaten/Kota : 3907
10. Lokasi Koordinat
 - a. Latitude : -5.1118823
 - b. Longitude : 105.3020823
11. Nama Pimpinan Kantor : MUHAMMAD ADITYA PUTRA
12. No. Telepon Kantor : 0
13. Sandi Kantor Kendali :
14. Tanggal Persetujuan :

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
PT BANK MUAMALAT INDONESIA	Giro	giro pada aktiva	01-01-2015
BANK SYARIAH INDONESIA	Giro	giro pada aktiva	01-01-2015
BANK CIMB NIAGA SYARIAH	Giro	giro pada aktiva	30-12-2021
PT BPRS ARTHA MADANI	Deposito Antar Bank Aktiva	deposito antar bank aktiva dengan jangka waktu 6 bulan	16-11-2023
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH BEKASI	Deposito Antar Bank Aktiva	deposito antar bank aktiva dengan jangka waktu 12 bulan	29-11-2023
PT BPRS LAMPUNG BARAT	Deposito Antar Bank Aktiva	deposito antar bank aktiva dengan jangka waktu 12 bulan	30-12-2022
PT BPRS KOTABUMI	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	09-03-2015
PT BPRS MITRA AGRO USAHA	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	10-06-2021
PT BPRS BANDAR LAMPUNG	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	25-04-2024
PT BPRS WAY KANAN	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	22-09-2015
PT BPRS LAMPUNG BARAT	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	19-06-2023
PT BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTE	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	29-06-2021
PT BPR SYARIAH TANGGAMUS	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	15-08-2023
PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 6 bulan	29-11-2022
PT BPR LANGGENG LESTARI BERSAM	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 6 bulan	16-05-2019
PT BPRS SUKOWATI SRAGEN	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	28-12-2020
PT BPR BAHTERA ARTHA JAYA	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	30-05-2023
PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	16-12-2021
PT BPRS AL MABRUR KLATEN	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	14-02-2022
PT BPRS HIJRA ALAMI	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	29-06-2022
PT BPRS DANA AMANAH	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	28-12-2022
PT BPR LABUHAN DANA SENTOSA	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	24-06-2024
PT BPR INDRA CANDRA	Deposito Antar Bank Pasiva	deposito antar bank pasiva dengan jangka waktu 12 bulan	08-07-2024
PT BPRS AL MAKMUR	Tabungan Antar Bank Pasiva	tabungan antar bank pasiva	08-07-2024

PT BPRS AMAN SYARIAH BEKERJA SAMA DENGAN BANK LAIN DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

- Nama Kantor BPR Syariah : BPRS AMAN SYARIAH
- Sandi Kantor BPR Syariah : 001
- Alamat Kantor BPR Syariah
 - Nama Jalan dan No. : JL. RAYA SUMBERGEDE
 - Desa/Kelurahan dan Kecamatan : SUMBERGEDE
 - Kab./Kota : 3907
 - Kode Pos : 34352
- Lokasi Koordinat Kantor
 - Latitude : -5.134521
 - Longitude : 105.428596
- Status Kepemilikan Gedung : 1
- Nama Pimpinan Kantor : RAFIQ KAUTSAR
- No. Telp : 7255100000
- Jumlah Karyawan : 37

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Karyawan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
S3	0	0
S2	1	0
S1/D4	9	14
D3	1	1
SLTA	3	8
Lainnya	0	0

b. Berdasarkan Bagian

Bagian	Jumlah Karyawan	
	Tetap	Tidak Tetap
Pemasaran	1	5
Pelayanan	1	5
Lainnya	12	13
Total	14	23

- Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 22
 - Perempuan : 15
- Usia

Form 01.00
DATA KANTOR BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

a. <=25	:	3
b. >25 - 35	:	28
c. >35 - 45	:	5
d. >45 - 55	:	1
e. >55	:	0
11. Jumlah Sentra Keuangan Khusus	:	0
12. Jumlah Kantor Kas	:	2
13. Jumlah Kas Keliling	:	0
14. Jumlah EDC	:	
a. Milik Sendiri	:	0
b. Milik Bank Umum	:	0
c. Milik BPR Syariah/BPR Lain	:	0
15. ATM	:	
a. Jumlah Dikelola Sendiri	:	0
b. Jumlah ATM Kerjasama dengan Pihak Lain	:	0
c. Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	0
d. Nama Pihak yang Bekerja sama dengan BPR Syariah	:	nihil
16. Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan	:	
a. Status Data	:	0
b. Persetujuan OJK	:	
1) Nomor	:	
2) Tanggal	:	
c. Alamat Sebelumnya	:	
d. Tanggal Pelaksanaan	:	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatann
pelatihan penyusunan pelaporan ira apu ppt dan pppspm	20-02-2024	02	03	1	1
pelatihan pelaporan apu ppt	22-02-2024	02	03	1	1
audit internal berbasis kepatuhan	04-03-2024	02	03	1	1
strategi mengakselerasi pangsa pasar keuangan syariah	21-03-2024	02	03	2	1
pelatihan tata kelola, menrisk dan kepatuhan bprs (urgensi, regulasi dan implementasi)	21-04-2024	02	01	3	1
workshop online	28-05-2024	02	03	1	1
sosialisasi sak ep dan sak syariah untuk bprs	03-06-2024	02	01	4	1
pelatihan sak ep mitrasoft	05-06-2024	02	03	1	1
pelatihan pelaporan ira	09-06-2024	02	01	2	1
sosialisasi cinta rupiah dan qris	25-06-2024	02	01	2	1
leadership qualities dan selling skill	12-07-2024	02	03	3	1
sertifikasi psp	25-07-2024	02	02	1	1
pelatihan sindikasi	03-08-2024	02	01	4	1
pdps	15-08-2024	02	01	4	1
seminar nasional	20-08-2024	02	02	1	1
sosialisasi pph ps 21 dengan perhitungan ter	02-09-2024	02	03	1	1
ijtima samawi	13-09-2024	02	02	2	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatann
analisa pembiayaan umkm berbasis scoring	13-09-2024	02	01	4	1
pelatihan from mindset to market acquisition	03-10-2024	02	02	1	1
ijtima samawi	14-10-2024	02	02	1	1
pelatihan si insaf	21-10-2024	02	03	2	1
sosialisasi pajak aoei	07-11-2024	02	01	2	1
penilaian appraisal atau aset perusahaan perbankan	15-11-2024	02	01	2	1
pelatihan tot sak ep	26-11-2024	02	03	1	1
sertifikasi infaq	13-12-2024	02	02	1	1

PT BPRS Aman Syariah berupaya terus melakukan pengembangan sumber daya manusi dengan mengikutsertakan karyawan dalam sosialisasi dan pelatihan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Aset	Sandi	Jumlah
1.	Kas dalam Rupiah	101	681.232.500
2.	Kas dalam Valuta Asing 4)	102	0
3.	Surat Berharga Syariah 37)	111	0
4.	Penempatan pada Bank Lain 5)	120	7.826.348.433
5.	Piutang	130	35.929.105.995
	a. Piutang Murabahah 6)	131	18.731.102.633
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/- 6)	132	7.250.117.157
	c. Piutang Istishna 7)	141	0
	d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/- 7)	142	0
	e. Piutang Multijasa 8)	143	43.848.597.069
	f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/- 8)	144	19.400.476.550
	g. Piutang Qardh 9)	150	0
	h. Piutang Sewa 11)	160	0
6.	Pembiayaan Bagi Hasil 10)	170	1.750.000.000
	a. Mudarabah	171	0
	b. Musyarakah	172	1.750.000.000
	c. Lainnya	173	0
7.	Penyertaan Modal	179	0
8.	Salam 13)	200	0
9.	Aset Istishna dalam Penyelesaian 14)	211	0
	Termin Istishna -/- 14)	212	0
10.	Ijarah 11)	180	0
	a. Aset Ijarah	181	0
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	182	0
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	183	0
11.	Persediaan 15)	220	30.532.797
12.	Agunan yang Diambil Alih 16)	230	0
13.	Properti Terbengkalai	231	0
14.	Aset Tetap dan Inventaris 17)	241	811.239.501
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/- 17)	242	631.323.458
15.	Aset Tidak Berwujud 18)	251	102.275.000
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/- 18)	252	93.271.867

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Aset	Sandi	Jumlah
16.	Aset Keuangan Lainnya	271	0
17.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 12)	190	1.998.450.818
18.	Aset Lainnya 20)	270	2.151.373.182
	TOTAL ASET	290	46.559.061.265

No	Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
1.	Liabilitas Segera 21)	310	88.174.630
2.	Tabungan Wadiah 22)	320	8.487.448.852
3.	Simpanan Mudarabah 23)	330	13.471.105.041
	a. Tabungan Mudarabah	331	4.964.933.041
	b. Deposito Mudarabah	332	8.506.172.000
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	340	0
5.	Liabilitas kepada Bank Lain 24)	350	17.601.002.444
6.	Pembiayaan Diterima 25)	360	0
7.	Liabilitas Lainnya 27)	380	174.131.030
8.	Dana Syirkah Temporer	390	0
	a. Pembiayaan Diterima 25)	394	0
9.	Modal Disetor 28)	410	8.418.000.000
	a. Modal Dasar	411	15.000.000.000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-	412	6.582.000.000
10.	Tambahan Modal Disetor	420	0
	a. Agio 28)	421	0
	b. Disagio -/- 28)	422	0
	c. Modal Sumbangan 28)	423	0
	d. Dana Setoran Modal 28)	424	0
	e. Lainnya	430	0
	i. Faktor Penambah	431	0
	ii. Faktor Pengurang	432	0
11.	Ekuitas Lain	444	0
	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	441	0
	b. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	440	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	c. Lainnya	442	0
	d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain -/-	443	0
12.	Cadangan	450	811.015.383
	a. Umum	451	811.015.383
	b. Tujuan	452	0
13.	Laba/Rugi	460	(2.491.816.115)
	a. Tahun-tahun Lalu	470	33.984.954
	i. Laba	471	33.984.954
	ii. Rugi -/-	472	0
	b. Tahun Berjalan 3)	480	(2.525.801.069)
	i. Laba	481	0
	ii. Rugi -/-	482	2.525.801.069
	Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	490	46.559.061.265

No	Rekening Administratif	Sandi	Jumlah
I.	TAGIHAN KOMITMEN	500	0
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik 25)	510	0
	a. Bank	511	0
	b. Lainnya	512	0
	2. Lainnya	520	0
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	600	0
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik 10)	610	0
	a. Bank	611	0
	b. Lainnya	612	0
	2. Lainnya	620	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	700	0
	1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	710	0
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720	0
	a. Murabahah	721	0
	b. Istishna	722	0
	c. Multijasa	723	0
	d. Sewa	724	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening Administratif	Sandi	Jumlah
	e. Bagi hasil	725	0
	f. Surat Berharga Syariah	727	0
	g. Lainnya	726	0
	3. Lainnya	730	0
IV.	LAINNYA	800	0
	1. Aset Produktif yang Dihapusbuku 29)	810	0
	a. Aset Produktif	811	0
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812	0
	2. Aset Produktif yang Dihapus tagih	820	0
	3. Penerusan Dana (Channeling) 30)	830	0

FORM 03.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
- GABUNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
A.	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	10000	5.426.523.190
	1. Surat Berharga Syariah	10200	0
	2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	11000	99.610.285
	a. Bonus Wadiah	11100	16.701.113
	i. Giro	11110	16.701.113
	ii. Tabungan	11120	0
	b. Bagi Hasil	11200	82.909.172
	i. Giro	11210	0
	ii. Tabungan	11220	0
	iii. Deposito	11230	82.909.172
	c. Lainnya	11300	0
	3. Pembiayaan yang diberikan	12000	5.326.912.905
	a. Kepada bank lain	12100	0
	i. Pendapatan Piutang	12110	0
	a) Murabahah	12111	0
	b) Istishna	12112	0
	c) Multijasa	12113	0
	d) Ujrah	12114	0
	i. Gadai	12115	0
	ii. Lainnya	12116	0
	e) Lainnya	12117	0
	ii. Pendapatan Bagi Hasil	12120	0
	a) Mudarabah	12121	0
	b) Musyarakah	12122	0
	c) Lainnya	12123	0
	iii. Pendapatan Sewa	12130	0
	a) Pendapatan Ijarah	12131	0
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	0
	b. Kepada pihak ketiga bukan bank	12200	5.326.912.905
	i. Pendapatan Dari Piutang	12210	4.772.853.152
	a) Murabahah	12211	1.516.339.908
	b) Istishna	12212	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	c) Multijasa	12213	3.256.513.244
	d) Ujrah	12214	0
	i. Gadai	12215	0
	ii. Lainnya	12216	0
	e) Lainnya	12217	0
	ii. Pendapatan Bagi Hasil	12220	554.059.753
	a. Mudarabah	12221	0
	b. Musyarakah	12222	554.059.753
	c. Lainnya	12223	0
	iii. Pendapatan Sewa	12230	0
	a. Pendapatan Ijarah	12231	0
	b. Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232	0
	iv. Pendapatan Salam	12240	0
	4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi hasil/Sewa -/-	14000	0
B.	Bagi Hasil untuk Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah dan Dana Syirkah Temporer -/-	15000	2.450.059.464
	1. Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah	15100	2.450.059.464
	a. Kepada Bank Lain	15110	1.707.386.663
	i. Tabungan	15111	0
	ii. Deposito	15112	1.707.386.663
	iii. Pembiayaan diterima	15113	0
	iv. Lainnya	15114	0
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	742.672.801
	i. Tabungan	15121	176.642.109
	ii. Deposito	15122	566.030.692
	iii. Pembiayaan diterima	15123	0
	iv. Lainnya	15124	0
	2. Dana Syirkah Temporer	15200	0
	a. Kepada Bank Lain	15210	0
	i. Pembiayaan diterima	15213	0
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	0
	i. Pembiayaan diterima	15223	0
C.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I - II)	19000	2.976.463.726
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	369.643.327

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	1. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Investasi Terikat	21000	0
	2. Pendapatan Dari Penyertaan, Fee/Komisi/Provisi	22000	6.014.000
	a. Pendapatan fee wakalah	22100	0
	b. Pendapatan fee kafalah	22200	0
	c. Pendapatan jasa lainnya	22300	6.014.000
	d. Dividen	22400	0
	e. Keuntungan dari Penyertaan dengan Equity Method	22500	0
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	0
	4. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	28000	0
	5. Pemulihan CKPN	24000	262.561.431
	6. Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	0
	7. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	0
	8. Lainnya	27000	101.067.896
E.	Beban Operasional	30000	5.871.810.122
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	0
	2. Beban Imbalan Atas Pembiayaan Yang Diterima	30110	0
	3. Bonus Titipan Wadiah	30200	34.702.159
	a. Bank Lain	30210	0
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	34.702.159
	4. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	75.351.413
	a. Pembiayaan	30310	0
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	75.351.413
	c. Lainnya	30390	0
	5. Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	30400	1.943.032.960
	a. Penempatan Pada Bank Lain	30410	5.045.199
	b. Piutang	30420	1.935.487.761
	i. Piutang Murabahah	30421	194.472.298
	ii. Piutang Istishna	30422	0
	iii. Piutang Multijasa	30423	1.741.015.463
	iv. Piutang Sewa	30424	0
	v. Piutang Qardh	30425	0
	c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	2.500.000
	i. Mudarabah	30431	0
	ii. Musyarakah	30432	2.500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	iii. Lainnya	30433	0
	d. Surat Berharga Syariah	30440	0
	e. Penyertaan Modal	30450	0
	f. Lainnya	30490	0
	6. Kerugian Penurunan Nilai Aset lainnya	30500	0
	a. Aset Ijarah	30510	0
	b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	0
	c. Aset Tidak Berwujud	30530	0
	d. Agunan yang diambil Alih	30540	0
	e. Persediaan	30550	0
	7. Penyusutan/amortisasi	30600	88.890.853
	a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	79.887.733
	b. Aset Tidak Berwujud	30620	9.003.120
	c. Lainnya	30690	0
	8. Perbaikan Aset Ijarah	30700	0
	9. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	0
	10. Kerugian Pelepasan Aset Yang Diambil Alih	30900	0
	11. Tenaga Kerja	31000	2.838.812.746
	a. Dewan Komisaris & Pengawas	31010	411.240.094
	b. Direksi	31020	587.903.713
	c. Pegawai	31030	1.559.744.005
	d. Lainnya	31040	279.924.934
	12. Pendidikan dan Pelatihan	31100	92.875.149
	a. Dewan Komisaris & DPS	31110	24.348.949
	b. Direksi	31120	2.800.000
	c. Karyawan	31130	65.726.200
	d. Lainnya	31140	0
	13. Penelitian dan Pengembangan	31200	0
	14. Sewa	31300	241.201.882
	15. Pemasaran	31400	33.777.950
	a. Iklan	31410	0
	b. Lainnya	31420	33.777.950
	16. Barang dan Jasa	31500	270.402.867
	a. Beban penyelenggaraan teknologi informasi	31510	59.614.854

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	b. Lainnya	31520	210.788.013
	17. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	0
	18. Kerugian terkait Risiko Operasional	31700	0
	a. Kecurangan Internal	31710	0
	b. Kejahatan Eksternal	31720	0
	19. Kerugian dari Penjualan Surat Berharga	31810	0
	20. Kerugian dari Penyertaan Modal dengan Equity Method	31820	0
	21. Lainnya	31900	252.762.143
F.	1. Laba Operasional	40000	0
	2. Rugi Operasional	40100	2.525.703.069
G.	Pendapatan Non Operasional	41000	13.418.000
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	0
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	0
	3. Lainnya	41900	13.418.000
H.	Beban Non Operasional	42000	13.516.000
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	0
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	0
	3. Lainnya	42900	13.516.000
I.	1. Laba Non Operasional	43000	0
	2. Rugi Non Operasional	43100	98.000
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	0
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	2.525.801.069
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	0
L.	Pajak Tangguhan	46000	0
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	0
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	0
M.	Zakat	47000	0
N.	Laba/Rugi Bersih	48000	(2.525.801.069)
	1. Laba Bersih	48100	0
	2. Rugi Bersih	48200	2.525.801.069
O.	Penghasilan Komprehensif Lain		
	1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	51100	0
	b. Lainnya	51200	0

FORM 03.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
- GABUNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	c. Pajak Penghasilan terkait -/-	51300	0
	2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	52100	0
	b. Lainnya	52200	0
	c. Pajak Penghasilan terkait -/-	52300	0
P.	Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	60000	0
Q.	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	70000	0

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

(Dalam Satuan Rupiah)

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	0	0
3. Lainnya	0	0
IV. LAINNYA		
1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Aset Produktif	0	0
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	0	0
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	0	0
3. Penerusan Dana (Channeling)	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Pos	Sandi Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	Dana Setoran Modal
1	Saldo per 31 Des Tahun T-2	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividen	101000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Cadangan	102000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Setoran Modal	103000	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	104000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revaluasi Aset Tetap	105000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi Periode Berjalan	106000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos Penambah/Pengurang Lainnya	107000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Saldo per 31 Des Tahun T-1	200000	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dividen	201000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Cadangan	202000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Setoran Modal	203000	2.418.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	204000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revaluasi Aset Tetap	205000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Laba/Rugi Periode Berjalan	206000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos Penambah/Pengurang Lainnya	207000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo per 31 Des Tahun T	300000	8.418.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	695.343.822,00	0,00	695.343.822,00	1.390.687.644,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
838.171.814,00	0,00	0,00	0,00	838.171.814,00	1.676.343.628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838.171.814,00	0,00	695.343.822,00	0,00	1.533.515.636,00	9.067.031.272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	115.671.561,00	0,00	115.671.561,00	231.343.122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.000.000,00
(1.485.522.418,00)	0,00	0,00	0,00	(1.485.522.418,00)	(2.971.044.836,00)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(647.350.604,00)	0,00	811.015.383,00	0,00	163.664.779,00	8.745.329.558,00

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Pos	Sandi Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG			
	Pendapatan dari Penyaluran Dana	101010	90.345.620	40.026.173
	Pembayaran bagi hasil untuk Pemilik Dana Mudarabah	101020	(2.880.809)	62.087.400
	Penerimaan pendapatan operasional lainnya	101030	11.341.133	11.932.192
	Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	101040	0	0
	Beban Bonus Titipan Wadiah	101050	6.750.000	0
	Beban Tenaga Kerja	101060	9.801.000	8.645.855
	Beban Premi Aasuransi dan Penjaminan	101070	0	0
	Beban operasional lainnya	101080	733.401.272	713.423.870
	Pendapatan non operasional	101090	418.000	0
	Beban non operasional	101100	12.166.000	17.414.500
	Pembayaran pajak penghasilan	101110	0	0
	Pembayaran zakat	101120	0	0
	Penyaluran dana kebajikan	101130	0	0
	Penyesuaian lainnya	101990	0	0
1	Penurunan/Kenaikan atas Aset Operasional			
	Penempatan pada bank lain	102020	0	0
	Piutang Syariah	102030	0	0
	Pembiayaan Syariah	102040	0	0
	Ijarah	102050	0	0

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Pos	Sandi Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
	Salam	102060	0	0
	Agunan yang diambil alih	102070	0	0
	Aset lain-Lain	102080	3.833.274.620	2.290.474.895
	Penyesuaian lainnya	102990	0	0
2	Kenaikan/Penurunan liabilitas operasional			
	Liabilitas segera	103010	(15.046.514.184)	(8.235.590.540)
	Simpanan dari nasabah	103020	9.806.316.979	(5.295.939.084)
	Simpanan dari bank lain	103030	4.500.000.000	8.350.000.000
	Pinjaman yang Diterima	103040	0	0
	Liabilitas imbalan kerja	103050	0	0
	Liabilitas Lain-Lain	103060	6.234.554.442	9.399.002.160
	Penyesuaian lainnya	103990	0	0
	Arus Kas neto dari aktivitas operasi	100000	10.188.974.073	7.361.477.421
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	200010	86.272.800	6.960.000
	Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	200020	0	0
	Pembelian/penjualan Surat Berharga	200030	0	0
	Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	200040	0	0
	Penyesuaian lainnya	209990	0	0
	Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	200000	86.272.800	6.960.000

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Pos	Sandi Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Penerimaan/pembayaran pembiayaan subordinasi - diperhitungkan sebagai Modal Inti Tambahan	300010	0	0
	Penerimaan/pembayaran pembiayaan subordinasi - diperhitungkan sebagai modal pelengkap	300020	0	0
	Pembayaran dividen	300030	0	0
	Penyesuaian Lainnya	309990	0	0
	Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	300000	0	0
	Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	400000	10.275.246.873	7.368.437.421
	Kas dan setara Kas awal periode	500000	0	0
	Kas dan setara Kas akhir periode	600000	10.275.246.873	7.368.437.421

FORM 07.00
DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
I	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1	Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari:		
	a. Intern BPRS	24.398.629	18.182.688
	b. Ekstern BPRS	0	0
	Total Penerimaan	24.398.629	18.182.688
2	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
	a. Lembaga Amil Zakat	0	0
	b. Badan Amil Zakat	20.626.000	16.341.564
	Total Penyaluran	20.626.000	16.341.564
II	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1	Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari:		
	a. Intern BPRS	0	0
	b. Ekstern BPRS	0	0
	Total Penerimaan	0	0
2	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf		
	a. Badan Wakaf Indonesia	0	0
	b. Nadzir Lain	0	0

FORM 07.00
DAFTAR RINCIAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
	Total Penyaluran	0	0

FORM 08.00
DAFTAR RINCIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1	Saldo Awal Dana Kebajikan	6.833.024,00	11.744.725,00
2	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak dan Sedekah	42.274.010,00	35.606.040,00
	b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	0,00	0,00
	c. Denda	4.269.038,00	15.851.000,00
	d. Penerimaan Nonhalal	0,00	0,00
	e. Lainnya	0,00	0,00
	Total Penerimaan	46.543.048,00	51.457.040,00
3	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	0,00	0,00
	b. Sumbangan	2.750.000,00	28.000.957,00
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	41.665.122,00	28.367.784,00
	Total Penggunaan	44.415.122,00	56.368.741,00
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	2.127.926,00	(4.911.701,00)
5	Saldo Akhir Dana Kebajikan	8.960.950,00	6.833.024,00



NO: 00002/3.0385/AU.2/07/1558-1/1/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KepadaYth,

Dewan Komisaris dan Direksi

PT. BPRS Aman Syariah

Jl. Raya Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPRS Aman Syariah**, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan telah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Hal lain

Laporan Keuangan PT. BPRS Aman Syariah tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya tertanggal 31 Januari 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan

Partner



Dr. Einde Evana, S.E., M. Si., Ak., CA., CPA.

Nikap KEP 1021/KM.VI/1998

Nikap Cab 658/KM.1/2018

NIAP 1558

Bandar Lampung, 14 Januari 2025



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan



Form E.00.00

Surat Pernyataan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafiq Kautsar, S. Kom
Alamat Kantor : Jl. Raya Desa Sumbergede, Kec. Sekampung – Kab. Lampung Timur
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT. BPRS Aman Syariah menyatakan bahwa :

1. Kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR Syariah Aman Syariah.
2. Bertanggungjawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR Syariah Aman Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank; dan
3. Hasil penilaian terhadap efektivitas ppengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR Syariah Aman Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lampung Timur, 28 Januari 2025

PT. BPRS Aman Syariah



Rafiq Kautsar
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	: Jl. Raya sekampung, Desa Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur 34382
Nomor Telepon	: (0725)5100000
Penjelasan Umum	: Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) BPRS Aman Syariah sesuai dengan POJK Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dimana didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPRS wajib melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut yakni keterbukaan (transparency), pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas (accountability), professional (professional), dan kewajaran (fairness) guna meningkatkan kinerja BPRS, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan. BPRS Aman Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Lampung demi mencapai visi yaitu menjadi BPR Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh secara sehat dan kuat.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa: Secara structural dan infrastruktur penerapan tata kelola BPRS sudah dijalankan dengan sangat baik, seluruh komponen struktur telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, namun hal yang perlu ditingkatkan dan lebih dioptimalkan adalah dalam penerapan tata kelola BPRS untuk mendapatkan hasil penerapan tata Kelola yang baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

--

Keterangan

--

FORM F.02.02
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Rekomendasi Kepada Direksi

Keterangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
-------	---------	-------	---------

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah**Posisi Laporan** : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0
02	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0

Footer

PT BPRS Aman Syariah tidak memiliki Komite-Komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

FORM F.02.05
STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN DAN INDEPEDENSI ANGGOTA KOMITE

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	

Footer

PT BPRS Aman Syariah tidak memiliki Komite-Komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

FORM 01.02
DATA KEPEMILIKAN BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Status Perubahan
MAHFUD	1807051409720002	DUSUN IV PASAR RT/012 RW/005 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	1	2.224.000.000	26,42	9
WINARSIH	1872034305690002	JL. SUMBAWA NO.44 RT/RW 049/010	1	2	2.907.000.000	34,53	9
YUM BADARIAH	1807055602730001	DUSUN IV PASAR RT/012 RW/005 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	516.000.000	6,13	9
SUGIYANTO	1807062202860002	DUSUN ROWO TANGGAL RT/RW 012/004 BALE REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR	1	2	632.000.000	7,51	9
WINARTO	1807051310790002	DUSUN II RT/RW 004/002 HARGOMULYO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	434.000.000	5,16	9
SUWITARJO	1807051112680001	DUSUN II RT/RW 004/002 HARGOMULYO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	365.000.000	4,34	9
MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT	1807050603710002	HARGOMULYO RT/RW 009/002 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	275.000.000	3,27	9

FORM 01.02
DATA KEPEMILIKAN BPR SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Koreksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Status Perubahan
DUL ROHIM	1807060707580009	DUSUN ROWO TANGGAL RT/RW 013/004 BALE REJO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR	1	2	207.000.000	2,46	9
RENA PRASESTI	1807054503910001	DUSUN V RT/RW 016/007 SUMBERGEDE SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	137.000.000	1,63	9
DIAN PUSPITASARI	1807056403890001	DUSUN IV RT/RW 012/005 SUMBERGEDE SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	374.000.000	4,44	9
AGUS WIBOWO	3175071007680010	JL RAJAWALI NO 02 REJOMULYO RT/RW 024/006 METRO SELATAN	1	2	135.000.000	1,60	9
RAFIQ KAUTSAR	1872041912780004	JL. MANUNGGAL GG PALA V NO 07 RT/ RW 009/005 IRINGMULYO METRO TIMUR	1	2	149.000.000	1,77	9
MIFTAHUL FAJAR	1807052908900004	DUSUN III RT/RW 009/005 SAMBIKARTO SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1	2	63.000.000	0,75	9
Jumlah					8.418.000.000	100,01	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

No	Nama	Nomor Identitas	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku
							No. SK	Tanggal SK	
1	RAFIQ KAUTSAR	1872041912780004	JL. MANUNGGAL GG PALA V NO 07 RT/ RW 009/005 IRINGMULYO METRO TIMUR	1	15-02-2023	02-01-2027	S-122/KO.074/2023	15-02-2023	1
2	SUGIYANTO	1807062202860002	DUSUN ROWO TANGGAL RT/RW 012/004 BALEREJO KEC. BATANGHARI LAMPUNG TIMUR	2	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
3	MAHFUD	1807051409720002	DUSUN IV PASAR RT/012 RW/005 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	3	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
4	SUWITARJO	1807051112680001	DUSUN II RT/RW 004/002 HARGOMULYO KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	4	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
5	AGUS WIBOWO	3175071007680010	JL RAJAWALI NO 02 REJOMULYO RT/RW 024/006 METRO SELATAN	5	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1
6	MOHAMAD TAUFIK HIDAYAT	1807050603710002	HARGOMULYO RT/RW 009/002 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR	6	12-02-2022	12-02-2026	S-445/KO.074/2018	08-06-2018	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	Pendidikan Formal			Pendidikan Nonformal			Keanggotaan Komite			
	Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite
04-09-2024	3	04-10-2000	STMIK YPTK PADANG	SERTIFIKASI	28-08-2019	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
11-07-2026	2	11-04-2018	IAIM METRO	SERTIFIKASI	07-04-2016	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
27-04-2023	1	01-01-2000	STIT AGUS SALIM	SERTIFIKASI	27-04-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
14-05-2023	3	01-01-2000	STIT AGUS SALIM	SERTIFIKASI	14-05-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
27-04-2023	2	01-01-2000	UNIVERSITAS LAMPUNG	SERTIFIKASI	12-12-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	
14-05-2023	2	01-01-2000	UNIVERSITAS LAMPUNG	SERTIFIKASI	12-12-2018	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	0	0	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Unit Manajemen Risiko	Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)	Status Jabatan	Alasan Perubahan Jabatan	Keterangan Jabatan Anggota Direksi
1	2	2	0		Direktur Bisnis
2	1	2	0		Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan
0	2	2	0		
0	2	2	0		
0	2	2	0		
0	2	2	0		

FORM F.03.02
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR
SYARIAH



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Kelompok BPRS	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun
------	--------------------	----------------------------	----------------------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
------	-----------------	---------------------------	----------------------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham

FORM F.04.02

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

FORM F.05.01
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
------	-------------------------------------	------------------------------------	---------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	2	430.258.800	2	194.620.800	2	97.310.400
Tunjangan	2	53.390.800	2	17.784.000	2	8.892.000
Tantiem	0	0	0	0	0	0
Bonus	0	0	0	0	0	0
Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0	0	0
Remunerasi-Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Remunerasi		483.649.600		212.404.800		106.202.400
Fasilitas Lain						
Perumahan	0	0	0	0	0	0
Transportasi	0	0	2	31.920.000	2	15.960.000
Kesehatan	2	17.038.716	2	7.748.952	2	659.676
Fasilitas Lain-Lainnya	2	46.030.560	0	0	2	6.465.060
Total Fasilitas Lain		63.069.276		39.668.952		23.084.736
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		546.718.876		252.073.752		129.287.136

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS PT BPRS Aman Syariah

FORM F.07.00
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Rasio
	(a/b)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1,11
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,11
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1,11
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	5,29
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,45
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2,50

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah PT BPRS Aman Syariah

FORM F.08.01
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS-
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
02-01-2024	2	Pembahasan mengenai evaluasi kinerja Tahun 2023, persiapan RUPS tahunan, outlook pembiayaan tahun 2024, pemebtukan bagian lain untuk penilaian jaminan, dan membahas mengenai hasil pemeriksaan SPI.
13-02-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, RUP tahunan, hasil pemeriksaan OJK tahun 2023, dan pembiayaan nasabah bermasalah.
06-03-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, pembiayaan nasabah bermasalah, dan monitoring hasil temuan SPI.
02-04-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, strategi bisnis bank, penerpan APU PPT PPSPM, dan monitoring hasil temuan SPI.
06-05-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, pencapaian kinerja April 2024, evaluasi pencapaian RBB, strategi bisnis bank, dan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan OJK.
04-06-2024	2	Pembahasan rapat periode sebelumnya, pencapaian kinerja periode Mei 2024, evaluasi pencapaian RBB, strategi bisnis bank, penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan OJK, produktifitas karyawan, dan hasil pemeriksaan SPI.
02-08-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, pencapaian kinerja Juli 2024, evaluasi pencapaian RBB, strategi bisnis bank, dan hasil pemeriksaan SPI.
04-11-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, pencapaian kinerja Oktober 2024, evaluasi pencapaian RBB, dan strategi bisnis bank.
03-12-2024	2	Pembahasan hasil rapat sebelumnya, pencapaian kinerja November 2024, evaluasi pencapaian RBB, dan strategi bisnis bank.

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah melakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak 9 kali.

FORM F.08.02
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	

FORM F.08.02
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

FORM F.08.03
FREKUENSI RAPAT DPS - PELAKSANAAN RAPAT
DALAM 1(SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
04-01-2024	2	Pembahasan agenda pelaksanaan RUPS 2024 dan pembuatan laporan DPS.
12-02-2024	2	Peningkatan pengawasan DPS dalam penyaluran pembiayaan dan pemantapan rencana RUPS 2024.
07-03-2024	2	Pembahasan hasil pemeriksaan OJK terkait prinsip syariah dan pemeriksaan akad.
05-04-2024	2	Kinerja BPRS pada bulan Ramadhan dan pemeriksaan akad
08-05-2024	2	Good Corporate Governance (GCG) dan pemeriksaan akad.
05-06-2024	2	Strategi bisnis, peningkatan silaturahmi untuk meningkatkan DPK, dan pembinaan kepada seluruh karyawan.
03-09-2024	2	Sosialisasi Fatwa DSN MUI No. 153 Tahun 2022 dan rencana kegiatan Pra Ijtima' Tsanawi.
05-10-2024	2	Evaluasi pencatatan akuntansi pada pembiayaan murabahah
06-12-2024	2	SOP PU-PMSJT dan pembuatan laporan tahunan DPS untuk RUPS

Selama tahun 2024 Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 9 kali.

FORM F.08.04
KEHADIRAN RAPAT DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak terjadi Fraud

FORM F.10.00
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum Report Form Row Name	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Tidak terdapat benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
16-01-2024	01	Kegiatan Pengajian	Penceramah dan Peserta Pengajian	2.500.000,00
15-02-2024	01	Bantuan 1 unit Ac Mushola RSI Metro	RSI Metro	3.600.000,00
04-03-2024	01	Tali Kasih Anak Karyawan Sakit	Tika Ryan Abadi	250.000,00
06-03-2024	01	Kegiatan Pengajian BAS	Penceramah dan Peserta Pengajian	3.300.000,00
26-03-2024	01	Kegiatan Ramadhan Berbagi Ta'jil	Masyarakat Umum	3.300.000,00
07-05-2024	01	Kegiatan BAS Berbagi	Yayasan Peduli Bencana Sumbar	3.800.000,00
27-05-2024	01	Kegiatan BAS Berbagi Mei	Masyarakat Umum	1.500.000,00
20-06-2024	01	Kegiatan BAS Berbagi Juni	Sugiyanto	400.000,00
08-07-2024	01	Kegiatan BAS Berbagi (Lomba Da'i Cilik)	Seluruh Peserta Lomba Da'i	4.800.000,00
31-07-2024	01	Hadiah Lomba Da'i Cilik	Pemenang lomba Da'i Cilik	1.500.000,00
04-09-2024	01	Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Pondok Assalam	4.700.000,00
08-10-2024	01	Sumbangan Kegiatan Peringatan Hari Santri	Yayasan Bina Ilmu	1.000.000,00
18-10-2024	01	Pengajian Bank Aman Syariah	Peserta Pengajian (Karyawan)	200.000,00
24-10-2024	01	Kegiatan Hari santri	Yayasan Bina Ilmu	275.000,00
04-11-2024	01	Pembayaran Marbot Mushola	Slamet Riyadi, Saiful Anwar	100.000,00
04-11-2024	01	Tali Kasih Karyawan Sakit	Diah Retno Ningsih	250.000,00
12-11-2024	01	Tali Kasih Karyawan Sakit an Suharyadi	Suharyadi	500.000,00
26-11-2024	01	Pembelian Mukena	Mushola Insani BAS	200.000,00

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Aman Syariah

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
26-11-2024	01	Tali Kasih Orang Tua Karyawan	Gesang Bayuwingsih, Diah Retno Ningsih	1.000.000,00
03-12-2024	01	Bantuan Dana	MPM Muhammadiyah Lampung	1.000.000,00
03-12-2024	01	Pembayaran Marbot Mushola BAS	Slamet Riyadi, Saiful Anwar	100.000,00
27-12-2024	01	Tali Kasih Orang Tua Karyawan an Slamet Riyadi	Slamet Riyadi	250.000,00
27-12-2024	01	Tali Kasih Orang Tua Karyawan an Rahmat Ardi	Rahmat Ardi P	500.000,00

Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial PT BPRS Aman Syariah

Form G.00.00

Dokumen Pendukung

1. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola
2. Laporan Realisasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Nama Lembaga Jasa Keuangan: PT BPRS Aman Syariah

Posisi Laporan: 31 Desember 2024

**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
 PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT BPRS Aman Syariah
 Alamat : Jl. Raya Sekampung, Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur,
 Provinsi Lampung
 Nomor Telepon : (0725) 5100000
 Posisi Laporan : Desember 2024
 Modal Inti : Rp8.932.211.462
 Total Aset : Rp48.423.284.585

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPRS AMAN SYARIAH Tahun 2024, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.61	0.322
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.66	0.249
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1.72	0.172
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.17	0.163
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.150
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.97	0.148
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.65	0.124
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.47	0.037
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.69	0.127
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.20	0.110
12	Rencana Bisnis BPRS	1.74	0.087
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.75	0.088
Nilai Komposit			1.8
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.61)

Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penerapan tata kelola, Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun hal perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada penerapan tata kelola adalah implementasi kompetensi Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam aktivitas BPRS.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.66)

Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang perlu dioptimalkan dalam penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti mengevaluasi kebijakan strategis Direksi, pengawasan dalam tindak lanjut hasil temuan audit, serta pengawasan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan.

c) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 1.72)

Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah juga sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal penerapan tata kelola tugas dan tanggung jawab DPS yang masih perlu dioptimalkan yaitu dalam hal pengawasan DPS terhadap pelaksanaan kegiatan BPRS dan evaluasi kebijakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan BPRS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. selanjutnya DPS perlu menyusun program kerja yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas BPRS.

d) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp. 80.000.000.000 belum membentuk Komite-komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

e) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.17)

Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS sudah berjalan dengan baik. PE Manajemen Risiko dan PEAI telah memahami hal-hal terkait operasional perbankan syariah dengan baik. SDM yang bertanggung jawab dalam penyaluran dan penghimpunan dana juga memiliki pemahaman yang baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Namun demikian, masih perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. dalam penerapan tata kelola pelaksanaan prinsip syariah juga telah berjalan dengan baik. Setiap produk dan aktivitas baru juga memperhatikan fatwa DSN-MUI dan opini dari DPS, namun dalam hal penerapan prinsip syariah perlu lebih dioptimalkan agar tercipta budaya kepatuhan dan tidak ditemukan lagi pelanggaran terhadap prinsip syariah.

f) Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Secara struktural dan infrastruktur pada penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan baik, BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga dalam kegiatan BPRS apabila terjadinya benturan kepentingan dapat diatasi oleh BPRS sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Pada penerapan tata kelola terkait penanganan benturan kepentingan, BPRS akan terus berupaya agar penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah dibuat.

g) Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.97)

Secara struktural dan infrastruktur tata kelola penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS telah berjalan dengan baik. BPRS telah mempunyai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta telah menunjuk PE kepatuhan. Namun dalam hal penerapan fungsi kepatuhan pada BPRS perlu lebih dioptimalkan, seperti dalam pemantauan penerapan fungsi kepatuhan dalam

aktivitas BPRS dan penyesuaian kebijakan/prosedur BPRS dengan peraturan undang-undang dan/atau otoritas yang berlaku.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.65)

Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan secara baik dan efektif. BPRS telah memiliki PEAI yang melaksanakan fungsi audit dengan baik.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.47)

BPRS telah melaksanakan fungsi Audit Eksternal dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024 BPRS telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro.

j) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.69)

Secara struktural dan infrastruktur penerapan manajemen risiko BPRS berjalan dengan baik. BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko, termasuk penerapan limit risiko serta sistem informasi yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko. Namun secara penerapan manajemen risiko hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dalam melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh serta upaya dalam menumbuhkan budaya sadar risiko dalam seluruh jenjang organisasi.

k) Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS secara struktural dan infrastruktur berpedoman pada peraturan OJK dan undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran BMPD.

l) Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana bisnis BPRS secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. Rencana bisnis BPRS telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Dan setiap semesternya BPRS juga menyampaikan laporan terkait pencapaian dan pengawasan RBB.

m) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.75)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. BPRS telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan secara transparan kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa: Secara struktural tata kelola BPRS pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sudah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Yang perlu lebih dioptimalkan adalah dalam penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan prinsip syariah secara struktural dan infrastruktur juga baik, setiap produk dan aktivitas BPRS berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan opini dari DPS, namun dalam hal penerapan prinsip syariah perlu lebih dioptimalkan agar tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah. Dalam penanganan benturan kepentingan BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan dapat berjalan lebih optimal. Secara struktural penerapan fungsi kepatuhan BPRS telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPRS telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan, adapun hal yang masih perlu mendapat perhatian lebih adalah dalam monitoring penerapan fungsi kepatuhan serta penyesuaian kebijakan/prosedur BPRS dengan peraturan undang-undang dan otoritas yang berlaku. Penerapan fungsi audit intern dan ekstern juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Secara struktural dan infrastruktur

penerapan Manajemen Risiko BPRS telah berjalan dengan baik, BPRS telah menunjuk PE Manajemen Risiko, namun pada penerapan tata kelola terkait dengan pengendalian intern yang menyeluruh perlu lebih dioptimalkan. BMPD, Rencana Bisnis BPRS, serta transparansi laporan keuangan dan nonkeuangan BPRS telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan OJK yang berlaku baik secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya.

Lampung Timur, 20 Januari 2025

PT. BPRS AMAN SYARIAH

Menyetujui



Rafiq Kautsar
Direktur Utama



H. Mahfud
Komisaris Utama

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRS TAHUN 2024
BOBOT BPRS B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.61	0.322	Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penerapan tata kelola, Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun hal perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada penerapan tata kelola adalah implementasi kompetensi Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam aktivitas BPRS.
B0200	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.66	0.249	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang perlu dioptimalkan dalam penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti mengevaluasi kebijakan strategis Direksi, pengawasan dalam tindak lanjut hasil temuan audit, serta pengawasan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan.
B0300	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bobot 0.1, S+P+H = 1.72	0.172	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah juga sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal penerapan tata kelola tugas dan tanggung jawab DPS yang masih perlu dioptimalkan yaitu dalam hal pengawasan DPS terhadap pelaksanaan kegiatan BPRS dan evaluasi kebijakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan BPRS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. selanjutnya DPS perlu menyusun program kerja yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas BPRS.
B0400	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp. 80.000.000.000 belum membentuk Komite- komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

B0500	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS Bobot 0.075, S+P+H = 2.17	0.163	Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS sudah berjalan dengan baik. PE Manajemen Risiko dan PEAI telah memahami hal-hal terkait operasional perbankan syariah dengan baik. SDM yang bertanggung jawab dalam penyaluran dan penghimpunan dana juga memiliki pemahaman yang baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Namun demikian, masih perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. dalam penerapan tata kelola pelaksanaan prinsip syariah juga telah berjalan dengan baik. Setiap produk dan aktivitas baru juga memperhatikan fatwa DSN- MUI dan opini dari DPS, namun dalam hal penerapan prinsip syariah perlu lebih dioptimalkan agar tercipta budaya kepatuhan dan tidak ditemukan lagi pelanggaran terhadap prinsip syariah.
B0600	Penanganan Benturan Kepentingan Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.150	Secara struktural dan infrastruktur pada penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan baik, BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga dalam kegiatan BPRS apabila terjadinya benturan kepentingan dapat diatasi oleh BPRS sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Pada penerapan tata kelola terkait penanganan benturan kepentingan, BPRS akan terus berupaya agar penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah dibuat.
B0701	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bobot 0.075, S+P+H = 1.97	0.148	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS telah berjalan dengan baik. BPRS telah mempunyai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta telah menunjuk PE kepatuhan. Namun dalam hal penerapan fungsi kepatuhan pada BPRS perlu lebih dioptimalkan, seperti dalam pemantauan penerapan fungsi kepatuhan dalam aktivitas BPRS dan penyesuaian kebijakan/prosedur BPRS dengan peraturan undang-undang dan/atau otoritas yang berlaku.
B0702	Penerapan Fungsi Audit Intern Bobot 0.075, S+P+H = 1.65	0.124	Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan secara baik dan efektif. BPRS telah memiliki PEAI yang melaksanakan fungsi audit dengan baik.
B0703	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.47	0.037	BPRS telah melaksanakan fungsi Audit Eksternal dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024 BPRS telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro.

B0800	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Bobot 0.075, S+P+H = 1.69	0.127	Secara struktural dan infrastruktur penerapan manajemen risiko BPRS berjalan dengan baik. BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko, termasuk penerapan limit risiko serta sistem informasi yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko. Namun secara penerapan manajemen risiko hal-hal yang perlu dioptimalkan adalah dalam melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh serta upaya dalam menumbuhkan budaya sadar risiko dalam seluruh jenjang organisasi.
B0900	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bobot 0.05, S+P+H = 2.2	0.110	Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS secara struktural dan infrastruktur berpedoman pada peraturan OJK dan undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran BMPD.
B1000	Rencana Bisnis BPRS Bobot 0.05, S+P+H = 1.74	0.087	Rencana bisnis BPRS secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. Rencana bisnis BPRS telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Dan setiap semesternya BPRS juga menyampaikan laporan terkait pencapaian dan pengawasan RBB.
B1100	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bobot 0.05, S+P+H = 1.75	0.088	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. BPRS telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan secara transparan kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nilai Komposit		1.8	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 mempunyai 2 orang Direksi, yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Direktur Utama beralamat di: Jl. Manunggal, Gang Pala V, No. 07, Rt/Rw 009/005, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. Sedangkan Direktur beralamat di: Dusun Rowo Tanggal, Rt/Rw 012/004, Desa Balerejo, Kec. Batanghari, Lampung Timur.
S0103	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Komisaris.
S0104	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Direksi melalui RUPS dan mendapat persetujuan dari OJK.
S0105	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan ataupun perusahaan lain.

S0106	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a) Untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b) Didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c) Konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan.
S0107	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Sesuai dengan ketentuan, Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat yang berisi etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
	Total	8	
	Rata-rata	1.14	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.57	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan sesuai ketentuan.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi melaksanakan komitmen atas hasil temuan SKAI, audit ekstern, dan OJK, dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komisaris dan DPS.

P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi memberikan data dan informasi kepada Komisaris dan DPS melalui rapat koordinasi setiap bulannya.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
P0105	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.
P0106	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Dilakukan pengembangan SDM dengan diikutsertakannya karyawan dalam berbagai pelatihan baik online maupun offline guna meningkatkan kualitas SDM. Direksi juga menyediakan dana pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, namun ketersediaan dana pendidikan belum mampu mengakomodir seluruh pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan SDM.
P0107	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sesuai prinsip kehati-hatian dan syariah.
	Total	15	
	Rata-rata	2.14	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.86	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan pada pemegang saham melalui RUPS setiap tahunnya.

H0102	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan strategis dibidang kepegawaian diungkapkan kepada pegawai.
H0103	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Risalah rapat Direksi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun keputusan strategis dan dissenting opinion telah didokumentasikan dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Dilakukan peningkatan pengetahuan SDM baik direksi maupun pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, namun peningkatan tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada pada BPRS.
H0105	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Laporan tata kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham, dan ASBISINDO serta dilakukan publikasi melalui website.
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.18	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sesuai dengan ketentuan PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 mempunyai 2 orang Komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	PT BPRS Aman Syariah memiliki 2 orang Komisaris, yang artinya jumlah Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi.
S0203	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor Pusat BPRS. Komisaris Utama beralamat di: Dusun IV Pasar, Rt/Rw: 012/005, Sumbergede Ke. Sekampung, Lampung Timur. Sedangkan Komisaris beralamat di: Dusun II, Rt/Rw: 004/002, Hargomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur.
S0204	Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Sesuai dengan ketentuan bahwa PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 belum diwajibkan memiliki Komisaris Independen.
S0205	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	PT BPRS Aman Syariah belum memiliki Komisaris Independen.
S0206	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Komisaris dilakukan melalui RUPS dan mendapat persetujuan dari OJK.

S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan ataupun perusahaan lain.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
S0209	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
	Total	11	
	Rata-rata	1.22	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.61	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi, Rekomendasi serta nasihat Dewan Komisaris terdokumentasi dengan baik.
P0202	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis BPRS.

P0203	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan OJK terkait BMPD.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	3	Dewan Komisaris belum secara rutin memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK serta hasil pengawasan Dewan Komisaris dan DPS.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta melakukan rapat koordinasi setiap bulan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.

P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan, namun belum dilakukan secara rutin dan berkala
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.85	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris terdokumentasi dengan baik dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris termasuk dissenting opinion jika terjadi perbedaan pendapat.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0300 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	PT BPRS Aman Syariah memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah, yaitu Ketua DPS dan anggota DPS.
S0302	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Seluruh Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga keuangan syariah lainnya.
S0303	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kerja.
S0304	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	Dewan Pengawas Syariah didukung oleh pegawai BPRS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, namun BPRS belum secara khusus menugaskan pegawai dalam mendukung tugas dan tanggung jawab DPS.
S0305	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan disetujui oleh OJK.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan/atau pergantian anggota DPS melalui RUPS.
P0302	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P0303	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun dalam pengawasan kegiatan BPRS perlu ditingkatkan.
P0304	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	Dewan Pengawas Syariah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

P0305	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat setiap bulan.
P0306	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI.
P0307	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.
	Total	15	
	Rata-rata	2.14	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.86	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semester.
H0302	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK sesuai waktu yang telah ditentukan
H0303	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS di dokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinions jika terjadi perbedaan pendapat.
H0304	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Seluruh anggota DPS tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain, adapun remunerasi dan fasilitas lain bagi DPS diputuskan melalui RUPS.

H0305	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian DPS, namun DPS belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS agar menurunkan dan menyelesaikan pelanggaran terhadap prinsip syariah.
	Total	8	
	Rata-rata	1.6	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.16	

B0400 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P0402	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P0403	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total	0	

	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0500 - Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam operasional perbankan syariah, namun masih perlu meningkatkan pengetahuannya.
S0502	PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Audit Intern memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam operasional perbankan syariah, namun masih perlu meningkatkan pengetahuannya.
S0503	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	SDM yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana memiliki pengetahuan baik terkait produk dan kegiatan perbankan syariah, namun masih perlu meningkatkan pengetahuannya.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Setiap produk dan aktivitas baru BPRS memperhatikan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
P0502	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS mengikuti fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H0501	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS mengikuti prinsip syariah.
H0502	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Masih adanya pelanggaran prinsip syariah dalam temuan audit intern, yaitu tidak adanya bukti murabahah.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0600 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, yang didalamnya juga berisi tentang prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPRS akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.
	Total	2	

	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0701 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0711	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <p>a) Tidak merangkap sebagai direktur utama; dan</p> <p>b) Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Direktur Kepatuhan memahami peraturan yang berlaku baik dari OJK maupun undang-undang tentang perbankan syariah.
S0713	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki PE Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
S0714	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS telah memiliki SOP Kepatuhan dan disetujui oleh Direksi dan dievaluasi dan dikinikan oleh PE Kepatuhan sesuai dengan peraturan terbaru.
S0715	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki pedoman kepatuhan yang juga berisi tentang tugas dan tanggung jawab PE Kepatuhan.
	Total	7	

	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0711	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan beum secara tertulis menyusun langkah untuk memastikan ketentuan intern, perundang-undangan, dan prinsip syariah sesuai dengan kegiatan BPRS termasuk juga dengan melakukan monitoring terkait penyampaian laporan kepada OJK atau otoritas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Direktur Kepatuhan melakukan upaya agar terciptanya budaya kepatuhan dengan memberikan arahan melalui sosialisasi. Namun sosialisasi atau pelatihan terkait ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah belum dilakukan secara rutin dan berkala.
P0713	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap komitmen kepada OJK dan/atau otoritas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
P0714	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur dan kegiatan BPRS sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip syariah, namun dalam hal pengawasan kegiatannya masih perlu ditingkatkan.

P0715	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau memberikan rekomendasi pengkinian kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki BPRS agar sesuai dengan peraturan terkini yang berlaku, namun belum seluruhnya ketentuan, kebijakan, sistem dan prosedur telah dilakukan evaluasi.
P0716	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Direktur Kepatuhan, PE Kepatuhan dan DPS melakukan koordinasi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan pada prinsip syariah.
	Total	15	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0711	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Masih adanya pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan intern dan prinsip syariah seperti ketidakpatuhan terhadap SOP dan pemenuhan bukti murabahah, namun seluruh aktivitas BPRS tetap berpedoman pada ketentuan intern, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
H0712	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direktur Kepatuhan membuat laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Komisaris secara berkala.
H0713	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal adanya ketidaksesuaian dalam kebijakan dan/atau keputusan Direksi dengan peraturan undang-undang, Direktur Kepatuhan akan melaporkan kepada OJK.
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	

	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.27	

B0702 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0721	BPRS menunjuk PEAI.	1	Sesuai dengan ketentuan, BPRS telah menunjuk PEAI.
S0722	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan Audit Intern
S0723	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
S0724	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0725	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS belum memiliki program rekrutmen, namun dalam rangka mengoptimalkan fungsi Audit Intern telah dilakukan pengembangan SDM dengan keikutsertaan PEAI dalam berbagai pelatihan.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0721	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	Penerapan fungsi Audit Intern BPRS telah sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPRS.
P0722	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
P0723	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai.

P0724	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan tentang audit intern.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0721	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PEAI menyampaikan laporan fungsi audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
H0722	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal adanya penyimpangan yang mengganggu kelangsungan usaha BPRS juga akan disampaikan kepada OJK.
H0723	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
H0724	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan pemberhentian PEAI dilaporkan kepada OJK.
	Total	6	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

B0703 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0731	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	1	BPRS telah menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS. Adapun KAP yang melakukan audit ekstern pada tahun 2024 adalah Tjahjo Machdjud Modopuro dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

P0731	<p>Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.</p> <p>a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	Audit keuangan BPRS dilakukan sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0731	<p>Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	Hasil audit dan komentar menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP.

H0732	<p>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.</p> <p>a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	<p>Hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
H0733	<p>Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	1	<p>Laporan hasil audit KAP dan surat komentar disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.17	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPRS menunjuk PEMR.	1	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
S0802	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
S0803	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terait dengan manajemen risiko.
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi paling sedikit mencakup: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f) Bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko dengan baik.

P0802	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b) Memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko dengan baik.
P0803	DPS paling sedikit mencakup: a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko dengan baik.
P0804	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material.
P0805	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang paling sedikit meliputi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan BPRS yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern dan prinsip syariah. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional serta mengidentifikasi kelemahan/ penyimpangan secara dini dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala. Namun pelaksanaan pengendalian intern belum dilakukan secara optimal.
P0806	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko pada PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti di bawah Rp.50 miliar yaitu 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.

P0807	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	Direksi belum secara optimal menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi, namun terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM terkait manajemen risiko melalui keikutsertaan dalam pelatihan.
	Total	16	
	Rata-rata	2.29	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.92	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah melaporkan profil risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas setiap semester kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS memiliki ketentuan Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD) yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan ketentuan penyaluran
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal adanya peraturan baru terkait BMPD, maka BPRS akan melakukan pengkinian prosedur agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P0902	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Penyaluran dana kepada pihak terkait maupun penyaluran dana besar mengikuti ketentuan peraturan undang-undang dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H0901	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah melakukan pelaporan penyaluran dana kepada pihak terkait secara benar dan tepat waktu. Dalam hal adanya pelanggaran atau pelampauan BMPD, maka BPRS juga akan melaporkan kepada OJK.
H0902	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Tidak terjadi pelanggaran BMPD pada tahun 2024.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B1000 - Rencana Bisnis BPRS

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana Bisnis BPRS disusun sesuai dengan visi dan misi BPRS dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
S1002	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Penyusunan rencana bisnis BPRS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
S1003	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) Faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b) Prinsip kehati-hatian; c) Asas perbankan yang sehat; dan d) Prinsip Syariah.	2	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat serta prinsip syariah.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pencapaian RBB.
	Total	4	
	Rata-rata	2	

	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Rencana bisnis BPRS maupun penyesuaian rencana bisnis dilaporkan kepada OJK. BPRS juga melaporkan realisasi rencana bisnis dan pengawasan rencana bisnis setiap semester kepada OJK.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan sudah didukung dengan sistem yang memadai yaitu dengan adanya core banking system dan dukungan SMD yang cukup kompeten.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulan sesuai dengan ketentuan OJK.

P1102	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
P1103	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Transparansi informasi mengenai produk dan layanan serta penggunaan data nasabah BPRS diupayakan untuk terus sesuai dengan peraturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
P1104	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan sesuai dengan format laporan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
	Total	6	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H1101	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	laporan keuangan publikasi BPRS ditandatangani Direksi dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
H1102	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen telah dilaporkan BPRS kepada OJK setiap tiga bulan sekali secara tepat waktu.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
BPRS AMAN SYARIAH**

**LAPORAN REALISASI
AKSI KEUANGAN
BERKELANJUTAN**

KANTOR PUSAT

PERIODE
2024

**PT . BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
BPRS AMAN SYARIAH**

Jl. Raya Sekampung, Sumbergede, Kec. Sekampung,
Kab. Lampung Timur, 34382, Telp. 0725-5100000
Email : bprs_amansyariah@yahoo.co.id
Website : www.bankamansyariah.co.id

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN REALISASI AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024
PT BPRS AMAN SYARIAH**

Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanda tangan dibawah ini menyetujui Laporan Realisasi Aksi Keuangan Berkelanjutan PT BPRS Aman Syariah tahun 2024 yang telah dibuat sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

PT BPRS AMAN SYARIAH
Lampung Timur, 30 April 2025

Dewan Direksi



Rafiq Kautsar
Direktur Utama



Sugiyanto
Direktur Yang Membawahi Fungsi
Kepatuhan

Dewan Komisaris



Hi. Mahfud, M.H
Komisaris Utama

BAB I. PROFIL PERUSAHAAN

1. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

PT BPRS Aman Syariah merupakan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang didirikan pada tahun 2014 dengan akta Notaris No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, SH dan mendapat pengesahan dari Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) No.AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PB.1/2014 tentang pemberian izin prinsip pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 02 Januari 2015 berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No.237/PB.131/2014 tentang pemberian izin usaha pada tanggal 30 Desember 2014.

Tujuan dibentuknya PT BPRS Aman Syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. PT BPRS Aman Syariah berpusat di Jalan Raya Sekampung Kelurahan Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan 2 Kantor Kas yang terletak di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan Komplek Pertokoan Pasar KOPINDO Kota Metro. PT BPRS Aman Syariah sebagai pelaku industri keuangan perbankan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang fungsinya pada saat ini tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan yang berkesinambungan sehingga menciptakan keberlanjutan tatanan sosial yang berorientasi pada lingkungan secara luas. PT BPRS Aman Syariah berupaya memberikan kinerja terbaik untuk menjadi “Bank terdepan dan terbesar di Provinsi Lampung” dengan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam rangka menciptakan terwujudnya visi misi PT BPRS Aman Syariah serta kontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menjadi “BPR Syariah Terdepan Dan Terbesar Di Provinsi Lampung”, PT BPRS Aman Syariah memiliki komitmen untuk ikut menciptakan keselarasan antara kegiatan perekonomian, keberagaman interaksi sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan, dengan mengedepankan tanggung jawab kepada *stakeholder*. PT BPRS Aman Syariah terus berproses dan berupaya untuk memberikan pertumbuhan yang baik bagi kepuasan seluruh pihak, kesempurnaan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti, oleh karena itu PT BPRS Aman Syariah senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka menjamin keberlanjutan melalui pembaharuan dan inovasi guna memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*.

2. VISI DAN MISI

- 1) Visi BPRS
Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat.
- 2) Misi BPRS
 - a. Meningkatkan perluasan jaringan dengan pembukaan kantor cabang di wilayah Lampung yang strategis.
 - b. Meningkatkan pelayanan secara profesional, Syariah dan Amanah yang memiliki nilai tambah.
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang berbasis syariah.
 - d. Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Governence* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
 - e. Meningkatkan fungsi dan peran Bank kepada masyarakat secara luas.
 - f. Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip *prudent*.

- g. Peningkatan permodalan yang seimbang sejalanannya pertumbuhan asset dan pendapatannya.

3. SKALA USAHA

PT BPRS Aman Syariah berdasarkan data kinerja sampai dengan periode 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Keterangan	Pencapaian Periode 2024 (Rp)
1	Aset	46.559.061.265
2	DPK	21.958.553.893
3	Pembiayaan	37.679.105.995
4	Liabilitas	39.559.556.337

4. KINERJA ASPEK BERKELANJUTAN

1) Kinerja Ekonomi

No.	Keterangan	Pencapaian Periode 2024 (Rp)
1	Aset	46.559.061.265
2	Pembiayaan	37.679.105.995
3	Modal kerja	6.736.708.462
4	Investasi	2.751.454.189
5	Konsumtif	28.190.943.344
6	Dana Pihak Ketiga	21.958.553.893
7	Tabungan Wadiah	8.487.448.852
8	Tabungan Mudharabah	4.964.933.041
9	Deposito	8.506.172.000
10	Pendapatan Operasional	5.796.166.517
11	Beban Operasional	8.321.869.586
12	Laba/Rugi	(2.525.801.069)

2) Kinerja Lingkungan Hidup

No.	Keterangan	Jumlah Biaya Periode 2024 (Rp)
1	Listrik	45.182.329
2	ATK	11.427.500
3	Kertas	3.875.000
4	Air Minum	1.125.000

3) Kinerja Sosial

No.	Bidang Kegiatan Sosial	Periode 2024 (Rp)
1	Pendidikan	7.575.000
2	Bencana Alam	3.800.000
3	Keagamaan	17.800.000
4	Lain-lain	5.850.000
Total		35.025.000

4) Sumber Daya Manusia

No.	Keterangan	Jumlah
1	Dewan Pengurus	
	Dewan Direksi	2
	Dewan Komisaris	2
	Dewan Pengawas Syariah	2

2	Pendidikan	
	S3	-
	S2	-
	S1	23
	D3	2
	SMA	12
3	Status Ketenagakerjaan	
	Karyawan Tetap	13
	Karyawan Kontrak	24
5	Jabatan	
	Kepala Bagian/Pejabat Eksekutif	5
	Staff	25
	Karyawan Dasar	7
Total Karyawan		37

5) Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Kepemilikan Saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Presentase Kepemilikan Saham (%)
1	Winarsih	2.907.000.000	2907	29,46
2	Mahfud	2.224.000.000	2224	26,42
3	Yum Badariah	516.000.000	516	6,13
4	Sugiyanto	632.000.000	632	7,51
5	Winarto	434.000.000	434	5,16
6	Suwitarjo	365.000.000	365	4,34
7	Mohamad Taufik Hidayat	275.000.000	275	3,27
8	Dul Rohim	207.000.000	207	2,46
9	Dian Puspitasari	374.000.000	374	4,44
10	Rena Prasesti	137.000.000	137	1,63
11	Rafiq Kautsar	149.000.000	149	1,77
12	Agus Wibowo	135.000.000	135	1,60
13	Miftahul Fajar	63.000.000	63	0,75

BAB II. STRATEGI BERKELANJUTAN

1. KEBIJAKAN MERESPON TANTANGAN

Dalam menjalankan organisasinya PT BPRS Aman Syariah memiliki inisiatif untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan secara luas untuk BPRS yang lebih baik. PT BPRS Aman Syariah berkomitmen kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan bisnis dan dampak sosial yang baik bagi lingkungan, diantaranya:

- 1) Nasabah, yaitu dengan memberikan layanan yang cepat, ramah, sopan dan santun;
- 2) Karyawan, yaitu dengan membangun keunggulan sumber daya insani yang kompetitif dan memungkinkan untuk tumbuh dalam kebaikan melalui kepemimpinan, kemampuan manajerial dan interaksi sosial;
- 3) Masyarakat, Bank bertanggung jawab dan berkomitmen untuk berbagi kebaikan kepada masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Pemegang Saham, menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
- 5) Regulator, menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan dan standar etika dalam melakukan bisnis yang sehat.

Tujuan aksi keuangan berkelanjutan ini mencakup 5 (lima) ruang yang harus dicapai guna memberikan kontribusi terhadap *stakeholder* dalam memberikan nilai tambah dan kesejahteraan dan kemajuan PT BPRS Aman Syariah secara luas.

2. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam menjalankan keuangan berkelanjutan tetap berkomitmen dan berkontribusi pada 3 prinsip yaitu Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi.

1) Sosial

Pelaksanaan Program sosial yang searah dengan program keuangan berkelanjutan sebagai berikut:

No.	Bidang	Bulan	Program Kegiatan
1	Pendidikan		
	Lomba Da'i Cilik	08-07-2024	Kegiatan Lomba Da'i Cilik diadakan sebagai bentuk kepedulian Bank terhadap pentingnya pendidikan agama sejak dini agar dapat menjadikan generasi penerus dengan akhlakul kharimah
	Peringatan Hari Santri	08-10-2024 24-10-2024	Bank memberikan support pada kegiatan peringatan Hari Santri di Yayasan Bina Ilmu Cendekia
2	Keagamaan		
	Kegiatan Pengajian Insan Bank Aman Syariah	16-01-2024 06-03-2024 18-10-2024	Kegiatan Pengajian Insan Bank Aman Syariah dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seluruh insan Bank Aman Syariah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan motivasi kerja serta menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama

	Bantuan 1 Unit AC untuk Mushola RSI Metro	15-02-2024	Sebagai bentuk kepedulian BPRS dalam menciptakan suasana yang lebih nyaman
	Berbagi Ta'jil Ramadhan	26-03-2024	Kegiatan Berbagi Takjil dilaksanakan oleh Bank sebagai bentuk sedekah untuk melatih kepedulian antar sesama dan mempererat tali silaturahmi
	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	04-09-2024	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW, memperkuat keimanan dan meneladani akhlak dan ajaran Nabi Muhammad SAW
	Pembayaran Honor Marbot Mushola	04-11-2024 03-12-2024	Pemberian Honor kepada Marbot Mushola diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan marbot, mendorong untuk lebih rajin dan ikhlas dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kualitas layanan dan kebersihan mushola
3	Bencana Alam		
	Berbagi kepada Yayasan Peduli Bencana Sumbar	07-05-2024	Aksi berbagi kepada Yayasan Peduli Bencana Sumbar diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana, memperkuat solidaritas sosial dan membangun komunitas yang lebih harmonis
4	Lain-lain		
	Kegiatan Berbagi dan Tali Kasih Karyawan Sakit	04-03-2024 27-05-2024 20-06-2024 04-11-2024 12-11-2024 26-11-2024 03-12-2024 27-12-2024	Tali Kasih kepada karyawan BPRS yaitu dalam rangka mempererat silaturahmi dan sebagai bentuk kepedulian Bank terhadap musibah yang dialami oleh karyawan

2) Lingkungan

Dampak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan usaha PT BPRS Aman Syariah terhadap lingkungan hidup terbilang sangat kecil. Demikian juga dengan dampak tidak langsung yang ditimbulkan relatif terbatas. Namun demikian, BPRS memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menekan dampak operasional terhadap lingkungan hidup dan turut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Bank berupaya melakukan efisiensi penggunaan sumber energi listrik dan air serta penggunaan kertas yang berlebihan. Di tahun 2024 BPRS Aman Syariah telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengurangi penggunaan sampah plastik dengan tidak lagi menggunakan air minum kemasan dalam seluruh

aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan Bank. Selanjutnya seluruh karyawan dihimbau untuk membawa *tumbler* (botol minum) masing-masing dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan Bank. Sepanjang tahun 2024 tercatat penggunaan untuk kebutuhan listrik, air dan kebutuhan pencetakan sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Listrik	4.276.923	3.845.391	3.768.388	3.779.513	3.069.564	3.862.149
2	Kertas	450.000	220.000	440.000	225.000	225.000	225.000
3	Air Minum	100.000	125.000	90.000	-	100.000	135.000
4	ATK	1.340.500	1.153.500	736.000	1.516.000	710.000	604.500

No	Jenis Penggunaan	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Listrik	2.491.640	4.146.611	4.127.514	3.354.882	4.394.400	4.065.327
2	Kertas	220.000	225.000	225.000	520.000	450.000	450.000
3	Air Minum	65.000	100.000	120.000	110.000	100.000	75.000
4	ATK	633.000	1.412.000	583.000	718.000	816.000	1.205.000

3) Ekonomi

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini PT BPRS Aman Syariah akan terus mengembangkan dan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung pada umumnya dengan target pasar utama adalah pengusaha UMKM dan juga pembiayaan kepada pegawai perusahaan yang telah bekerjasama. PT BPRS Aman Syariah berupaya meningkatkan portolio pembiayaan untuk membantu pembiayaan UMKM.

Uraian		Pencapaian Periode 2024 (Rp)	
Produk Usaha			
Penghimpunan Dana	5817 CIF	21.958.553.893	
Penyaluran Dana	310 CIF	37.679.105.995	
Aset Produktif Pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan			
Pembiayaan usaha berkelanjutan		3.096.676.661	
Total pembiayaan		37.679.105.995	
Jumlah dan Kualitas Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Jumlah Pembiayaan (Rp)	Kualitas Pembiayaan
Pengelolaan Limbah		771.344.908	2 (DPK)
UMKM		2.325.331.753	-

3. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Strategi Bank dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan didasari dari semangat seluruh Pemegang Saham untuk membangun Lampung yang lebih baik dan menjadi Bank Kebanggaan Masyarakat Lampung. Sebagai pelaku industri keuangan perbankan dewasa ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, fungsinya pada era sekarang telah bergeser tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan yang berkesinambungan sehingga menciptakan keberlanjutan tatanan sosial yang berorientasi pada lingkungan secara luas. PT BPRS Aman Syariah berupaya memberikan kinerja terbaik untuk menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang sehat, terpercaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Timur.

PT BPRS Aman Syariah merancang dan menentukan desain yang akan digunakan untuk menuju Sustainable Banking, serta kelengkapan kebijakan yang mendukung untuk menerapkan Sustainable Banking. Fase ini baru akan dilakukan oleh



Perusahaan dimulai dari tahun 2024 dengan menciptakan ekosistem organisasi dan inisiatif budaya.

PT BPR Syaiah Aman Syariah mempunyai strategi sebagai berikut:

- 1) BPRS akan melakukan penetrasi pasar ke wilayah pemasaran baru di pasar-pasar.
- 2) Melakukan penghematan energi, air, dan kertas.
- 3) Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.
- 4) Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
- 5) Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
- 6) Memperkuat kolaborasi dan koordinasi Bank dengan sektor industri hijau.

BAB III. TATA KELOLA BERKELANJUTAN

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPRS Aman Syariah belum memiliki Divisi/Unit Kerja khusus yang bertanggungjawab terhadap penerapan keuangan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya seluruh Divisi/Unit Kerja memiliki peran dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

- 1) Divisi Operasional
Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan Divisi terkait lainnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan. Melaksanakan program kerja sesuai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disusun dan memberikan informasi data hasil/realisasi pencapaian keuangan berkelanjutan kepada Direksi dan Divisi lain yang terkait.
- 2) Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Ikut serta dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan memastikan penyusunan pedoman Bank dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
- 3) Divisi Marketing
Melaksanakan program kerja sesuai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disusun dan mengelola dokumentasi kegiatan literasi yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Menerbitkan atau mengembangkan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya.
- 4) Divisi Umum dan Sumber Daya Insani
Melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.

2. PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPRS Aman Syariah memberikan edukasi kepada karyawan melalui sosialisasi dan pelatihan. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kompetensi pegawai khususnya tentang Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu manajemen menilai penting untuk mendorong pengembangan SDI. Adapun pelatihan-pelatihan yang telah diberikan antara lain:

No.	Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelatihan
1.	Coaching penyusunan pelaporan IRA (Identification Risk Assesment) APU PPT dan PPPSPM	OJK	20/02-2024
2.	Pelatihan Pelaporan APU PPT PPSPM	ASBISINDO JABAR	22/02/2024
3.	Audit Internal Berbasis Kepatuhan	PERBARINDO LAMPUNG	04/03/2024
4.	Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah	OJK	21/03/2024
5.	Pelatihan Tata Kelola, Manajemen Risiko & Kepatuhan BPRS (Urgensi, Regulasi & Implementasi)	ASBISINDO DPW LAMPUNG	21/04/2024

6.	Sosialisasi SAK EP dan SAK Syariah untuk BPRS (webinar)	OJK	21/04/2024
7.	SAK EP Mitrasoft	Mitrasoft	05/06/2024
8.	Pelatihan Pelaporan IRA (Identification Risk Assesment) APU PPT dan PPPSPM	ASBISINDO DPW LAMPUNG	09/06/2024
9.	Sosialisasi Cinta Rupiah & QRIS	Bank Indonesia	26/06/2024
10.	Leadership Qualities & Selling Skill	ASBISINDO DPW LAMPUNG	12/07/2024
11.	Pelatihan Sindikasi	BPRS Attaqwa	03/08/2024
12.	PDPS	ASBISINDO DPW LAMPUNG	15/08/2024
13.	Seminar Nasional	ASBISINDO	20/08/2024
14.	Sosialisai PPH pasal 21 dengan perhitungan TER	OJK dan Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung	02/09/2024
15.	Ij'tima Samawi 2024	MUI	13/09/2024
16.	Analisa Pembiayaan UMKM Berbasis Scoring	ASBISINDO DPW LAMPUNG	13/09/2024
17.	From Mindset To Market Acquisition	IMA LMPG	03/10/2024
18.	Undangan Ij'tima 2024	MUI	14/10/2024
19.	SI-INSAF	PERBARINDO LAMPUNG	21/10/2024
20.	Pelatihan Penilaian Apprasial atau Aset Perusahaan PerBankan	ASBISINDO DPW LAMPUNG	15/11/2024
21.	TOT SAK EP	OJK	26/11/2024

3. PROSEDUR IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PAMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, PT BPRS Aman Syariah melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua *stakeholder* dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang
- 2) Pengembangan sumber daya insani dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa.
- 4) Merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas karyawan/pegawai, sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas dan kapabilitas ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
- 5) Menyiapkan sumber daya insani yang dimiliki untuk menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumber daya insani dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen karyawan baru, pelatihan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.

- 6) Pengembangan dan penyesuaian produk dan jasa serta layanan perbankan yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.
- 7) Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor UMKM dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka Bank akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan pick up tabungan yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah tanpa harus datang langsung ke Bank.
- 8) PT BPRS Aman Syariah akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh Bank.
- 9) Mitigasi terhadap kualitas pembiayaan, meliputi:
 - a. Melakukan review atas menurunnya kualitas pembiayaan dan menentukan langkah perbaikan atau penyelesaian agar kualitas membaik.
 - b. Memastikan fungsi internal berjalan dengan baik termasuk pengawasan atas kualitas pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan sesuai dengan produk.
 - c. Melakukan kunjungan rutin kepada nasabah yang memiliki profil atau penurunan kualitas pembiayaan secara intensif.
- 10) Penyaluran pembiayaan berbasis lingkungan:
 - a. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
 - b. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari pembiayaan yang disalurkan.
- 11) Meningkatkan pelaksanaan program sosial kemanusiaan sebagai upaya Bank dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada disekitar Bank.

4. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan usaha merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang dan mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk mempengaruhi jalannya operasional atau terkena dampak dari perusahaan seperti pemegang saham, regulator, pegawai, mitra bisnis, komunitas/asosiasi, konsumen/pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Secara strategis, pemangku kepentingan turut mengembangkan dan mempengaruhi kinerja Bank. Oleh karena itu, senantiasa berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Bank selalu memastikan terselenggaranya hubungan yang baik dengan Pemangku Kepentingan dan memandang keterbukaan Informasi dan penyampaian informasi yang komprehensif merupakan bagian dari hak pemangku kepentingan.

5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Diperlukan persiapan dan penyesuaian, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di tahun 2024 antara lain:

- 1) PT BPRS Aman Syariah fokus pada perbaikan kondisi kualitas pembiayaan sehingga terdapat rencana aksi keuangan berkelanjutan yang belum terealisasi sesuai target.
- 2) Minimnya referensi terkait penyusunan pedoman kebijakan keuangan berkelanjutan.
- 3) Tahun 2024 merupakan tahun pertama pembuatan dan pelaksanaan program keuangan berkelanjutan sehingga masih membutuhkan pemahaman yang lebih matang.